



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# LAPORAN KINERJA

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

## TAHUN 2022







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta

Telp. (0274) 378431, 378432, 378433 Website : [www.kumham-jogja.info](http://www.kumham-jogja.info)

Nomor : W.14-PR.03 - 1021 17 Januari 2023  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Sifat : Segera  
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKJIP)  
Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Cq. Kepala Biro Perencanaan  
  
Di - Tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (terlampir)..

Demikian atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Agung Rektono Seto**  
NIP 197012021999031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.





## **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **KATA PENGANTAR**



Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah- Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.





Laporan Kinerja ini Menggambarkan dinamika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2022, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian dan RPJMN 2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022 dapat memberikan informasi mengenai program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2022, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022 ini juga merupakan bahan evaluasi dan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta di tahun-tahun berikutnya.



Yogyakarta, 15 Januari 2023  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Rektono Seto  
NIP 197012021999031001





## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
PRESTASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	1
1) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin	2
2) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
3) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Eselon	7
4) Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah	10
5) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan Golongan	11
B TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
C MAKSUD DAN TUJUAN	18
D ASPEK STRATEGIS	19
E ISU STRATEGIS	19
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	20
1. DIVISI ADMINISTRASI	21
2. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	25
3. DIVISI PEMASYARAKATAN	40
4. DIVISI KEIMIGRASIAN	46
F SISTEMATIKA LAPORAN	47
BAB II	50
PERENCANAAN KINERJA	50
A RENCANA STRATEGIS	50
1 VISI	50
2 MISI	51
3 TUJUAN	52
4 TATA NILAI	53
5 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN ANGGARAN	54
I Sasaran Strategis	55





II	Program dan Anggaran	60
III	Indikator Kinerja Sasaran	61
<b>B</b>	<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>61</b>
<b>BAB III</b>		<b>69</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>69</b>
<b>A</b>	<b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>69</b>
I	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya Dan Sumber Daya Manusia	70
II	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana/Prasarana	74
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2022	75
2	Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2022	77
3	Capaian Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022	84
4	Capaian Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun Anggaran 2022	133
5	Capaian Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022	141
6	Capaian Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun Anggaran 2022	149
7	Capaian Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022	154
8	Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022	162
9	Capaian Program Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022	176
<b>B</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>179</b>
<b>C</b>	<b>CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b>	<b>181</b>
1)	Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA	181
2)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	184
<b>D</b>	<b>CAPAIAN KINERJA LAINNYA</b>	<b>189</b>
1)	E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	189
2)	Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	190
3)	E-Monev BAPPENAS	195
4)	Kegiatan Prioritas Nasional	196
<b>BAB IV</b>		<b>204</b>
<b>A</b>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>204</b>
<b>B</b>	<b>SARAN</b>	<b>206</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b>		
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b>		





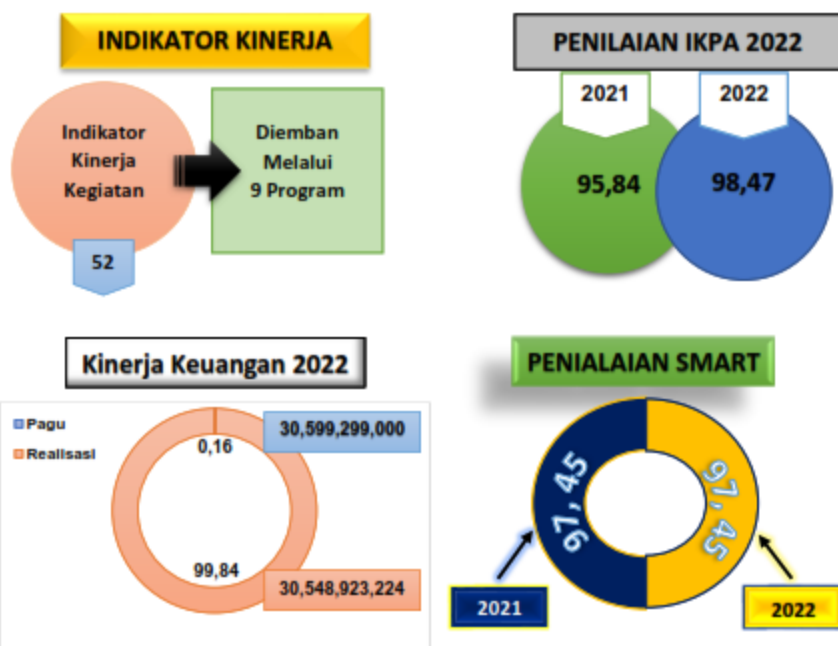
## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang terdiri dari:

### SASARAN KEGIATAN

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum;
3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD;
4. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
5. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal;
6. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia;
7. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah;
8. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
9. Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah;
10. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah;
11. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;
12. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah;
13. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah;
14. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar;
15. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
16. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar;
17. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar;
18. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar;
19. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
20. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
21. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah.





Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui 21 (dua puluh satu) Sasaran Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta sebagai berikut:





Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,89 Indeks	125%	22,295,771,000
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1 Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	16,12%	322%	2,113,000,000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	90,69%	111%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1 Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan	9747 Layanan	1545%	1,367,171,000
	2 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	11 Lokus	1100%	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1 Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	
	2 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	18 Lokus	900%	
	3 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100%	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	143%	216,853,000
	2 Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	3 Buku	300%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1 Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	126,25%	158%	240,000,000
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	108%	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan	1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	





peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah						
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	98,97%	122%	1,794,050,000
	2	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82,36%	103%	
	3	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,62%	125%	
	4	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%	
	5	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	500%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	200%	229,395,000
	2	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	167%	
	3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	12 Instansi Pemerintah	600%	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	200%	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsayarakatan yang berkualitas di wilayah	1	Indeks penyelenggaraan pemsayarakatan di wilayah	81%	104%	145%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100%	125%	1,008,050,000
	2	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	111%	139%	
	3	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	111%	139%	





<b>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</b>	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	97%	150%
	2	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	106%
	3	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	156%	195%
	4	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	-	-
	5	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%	100%
	6	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	41%	144%
	7	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	153%	229%
	8	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 orang	-	-
<b>Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar</b>	1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	144%
	2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	93%	156%
<b>Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</b>	1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	81%	161%
	2	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	72%	120%
	3	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	71%	236%
<b>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengawasan Anak di wilayah sesuai standar</b>	1	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100%	133%
	2	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	214%	214%
	3	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%
	4	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100%	125%





<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>	1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%	
	2	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%	
	3	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	100%	125%	
	4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	
<b>Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar</b>	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	
	2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	143%	
	3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	
	4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</b>	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,9	122%	1,335,009,000
	2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,97	127%	
	3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,94	126%	





Selama tahun 2022, secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dengan pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 30.599.299.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 30.548.923.224 (99,84%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi (layanan Administrasi Hukum Umum *Online*, Paspor dan Ijin Tinggal *Online*, Layanan Pemasyarakatan *Online*, Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual *Online*). Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, perpustakaan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi hak asasi manusia, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat.





## "PRESTASI YANG DIPEROLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022"



Kanwil Kemenkumham DIY memperoleh predikat sebagai Kantor Wilayah yang telah melaksanakan secara menyeluruh UPT PAS BERSINAR (Bersih dari Narkoba dan HP). Di tingkat UPT Lapas Narkotika Yogyakarta sebagai Terbaik II Bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bapas Kelas I Yogyakarta sebagai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terbaik III, LPKA Yogyakarta sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Terbaik I, Rutan Kelas IIB Wates sebagai Terbaik II Dalam Lomba Film Pendek, dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebagai Terbaik III Dalam Lomba Film Pendek serta Terbaik II Dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik.

Predikat Kantor Wilayah Terbaik I diberikan kepada Kanwil Kemenkumham DIY dalam Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2021.

Penghargaan tersebut diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada Kantor Wilayah yang telah efektif, efisien, dan inovatif dalam pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021. Pemberian penghargaan kepada Kantor Wilayah didasarkan pada hasil evaluasi dua aspek, yaitu SMART TA 2021 dan IKPA TA 2021.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani meraih penghargaan pada acara "Malam Syukuran dan Anugerah Kemenkumham HDKD Ke-77 Tahun 2022" yang diselenggarakan secara virtual.

Pada malam anugerah tersebut, Kadiv PAS DIY telah meraih penghargaan Karya Dhika Madya. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya dalam menciptakan Aplikasi SIMONAS. SIMONAS itu sendiri merupakan akronim dari Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi.

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan dalam acara Grand Prix Penilaian 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan atas partisipasinya sebagai penyelenggara dalam kegiatan Workshop Penilaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan di Rupbasan Yogyakarta pada tanggal 12-13 Juni 2022.





Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan. Penghargaan berhasil diraih dalam kontestasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award.

Kontestasi IKPA dan LKKL Award ini diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu memacu satuan kerja dapat menyajikan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan berkualitas.

Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY peringkat terbaik 1 IKPA Award kategori pagu besar (diatas 15 miliar).



Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan. Penghargaan berhasil diraih dalam kontestasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Award Tahun 2022.

Kontestasi IKPA dan LKKL Award ini diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu memacu satuan kerja dapat menyajikan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan berkualitas.

Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY peringkat 3 LKKL Award kategori satuan kerja kecil.

KOLABORASI UNTUK OPTIMALISASI EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY kembali meraih prestasi membanggakan di bidang kekayaan intelektual. Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Terbaik II Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2022.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY kembali meraih prestasi membanggakan di bidang kekayaan intelektual. Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Terbaik III Penilaian SMART Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2022.





Kanwil Kemenkumham DIY juga menerima penghargaan karena telah melaksanakan program unggulan terwujudnya Klinik Kekayaan Intelektual melalui Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile Intellectual Property Clinic). Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari memberikan apresiasi tinggi atas diraihnya penghargaan ini dan berharap jajaran Kanwil tetap bersemangat meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang kearsipan. Kanwil Kemenkumham DIY meraih Peringkat I Pengawasan Kearsipan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021. Piagam penghargaan Terbaik I Pengawasan Kearsipan Internal diserahkan secara langsung kepada Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari.



Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kantor Wilayah yang dipimpin Imam Jauhari itu berhasil meraih penghargaan Terbaik II atas Kinerja Berdasarkan Parameter IKPA, SMART, Nilai SAKIP, Nilai WBK/WBBM, dan Target Kinerja.

Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Target Kinerja TA 2023 Kementerian Hukum dan HAM dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Grand Mercure.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY yang juga meraih penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM turut berbangga dan mengapresiasi pemerintah daerah dalam upaya pemajuan HAM.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 dipusatkan di Jakarta. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari menegaskan pihaknya selaku pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM akan terus berkomitmen memajukan hak asasi manusia untuk semua orang.



## BAB I

# *Pendahuluan*



**Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Daerah Istimewa Yogyakarta**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat pada organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

- **Kondisi Sumber Daya Manusia**

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugastugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum





dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022.

**1) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin**

**Gambar 1.1 Total Pegawai Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta**



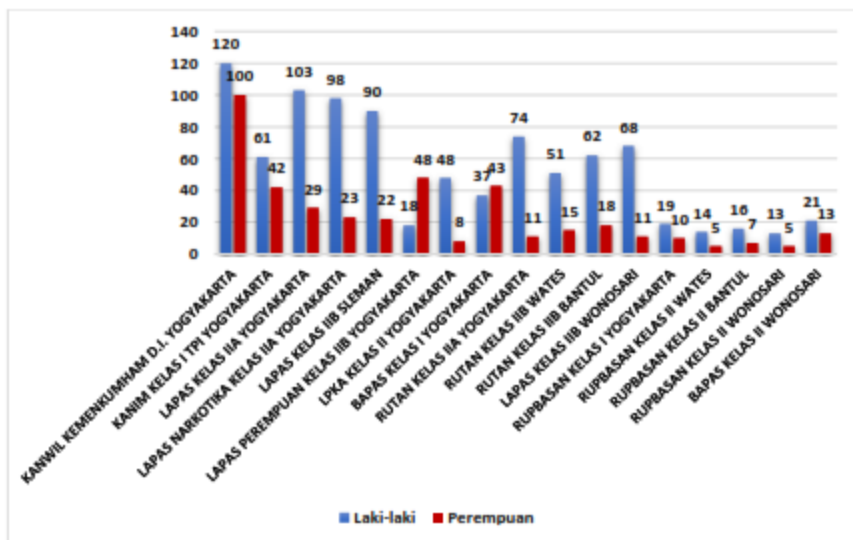
**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta**

NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	120	100	220
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	61	42	103
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	103	29	132
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	98	23	121
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	90	22	112
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	18	48	66
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	48	8	56
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	37	43	80
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	74	11	85
10	RUTAN KELAS IIB WATES	51	15	66
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	62	18	80
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	68	11	79
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	19	10	29
14	RUPBASAN KELAS II WATES	14	5	19
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	16	7	23
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	13	5	18
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	21	13	34
<b>TOTAL</b>		<b>913</b>	<b>410</b>	<b>1323</b>





**Grafik 1.3 Jenis Kelamin Jajaran Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta**



## 2) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan:

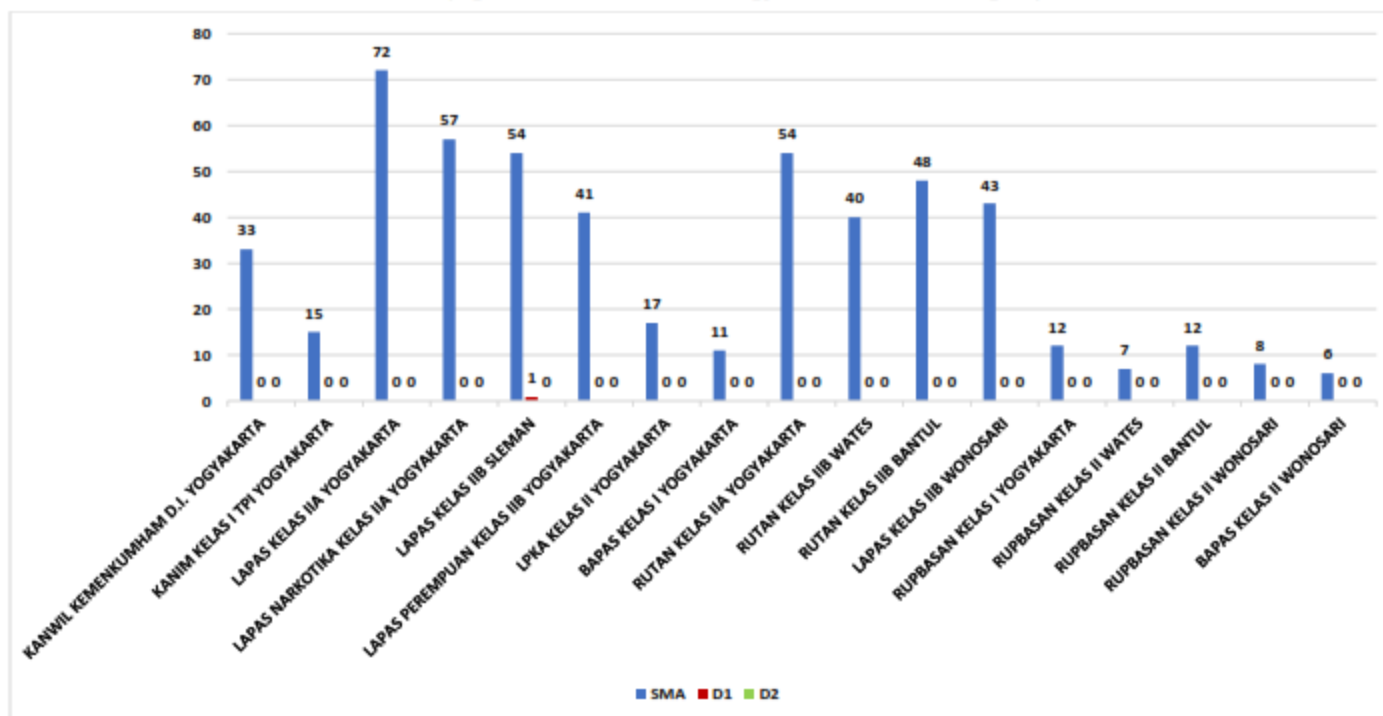
**Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

NO	SATUAN KERJA	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I.Y	33	0	0	9	1	107	70	1
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	15	0	0	6	12	60	10	0
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	72	0	0	3	1	47	10	0
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YK	57	0	0	7	0	50	7	0
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	54	1	0	6	0	46	5	0
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YK	41	0	0	3	0	19	2	0
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	17	0	0	2	0	23	1	0
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	11	0	0	4	0	52	13	0
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	54	0	0	3	0	24	2	1
10	RUTAN KELAS IIB WATES	40	0	0	2	0	22	2	0
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	48	0	0	3	0	27	2	0
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	43	0	0	3	0	33	1	0
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	12	0	0	4	1	11	1	0
14	RUPBASAN KELAS II WATES	7	0	0	0	0	11	1	0
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	12	0	0	0	0	11	0	0
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	8	0	0	0	0	10	0	0
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	6	0	0	2	0	21	5	0
<b>TOTAL</b>		<b>530</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>577</b>	<b>145</b>	<b>2</b>

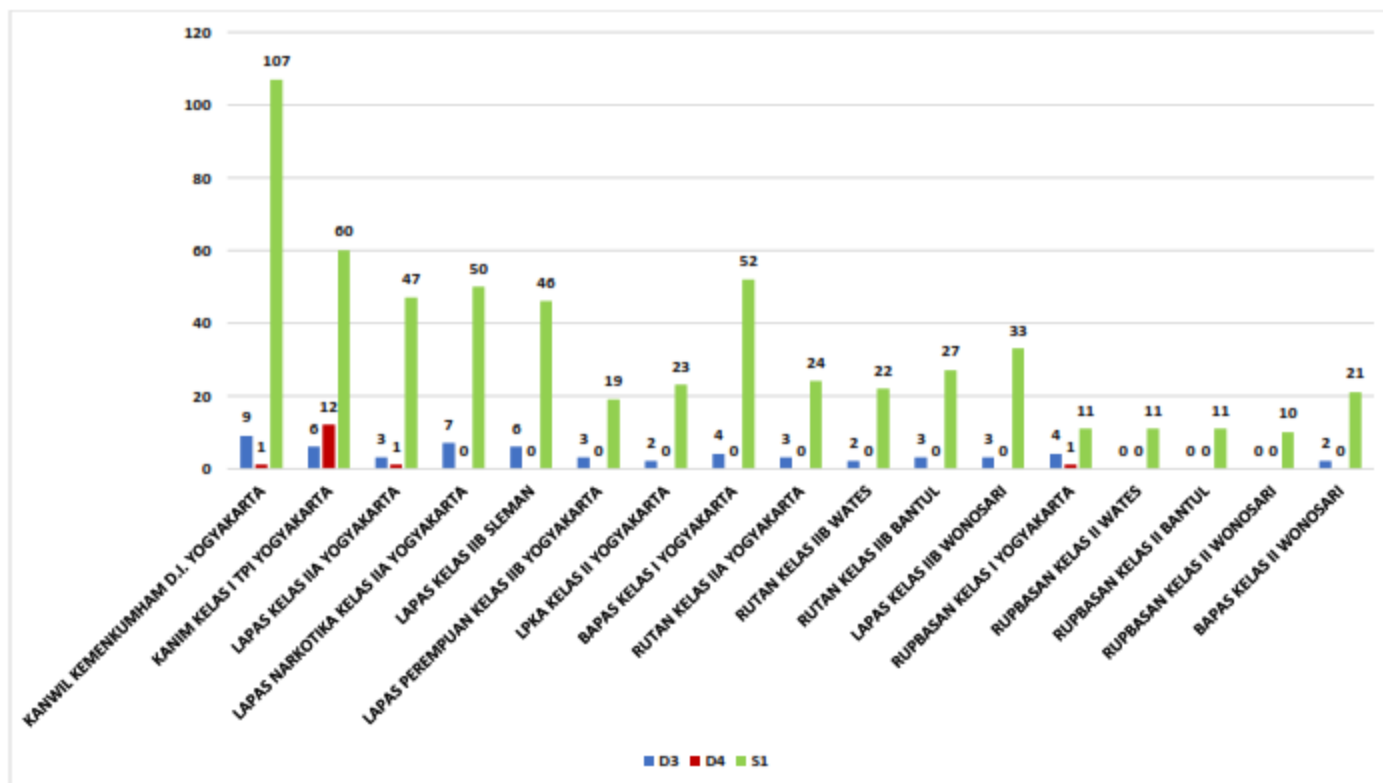




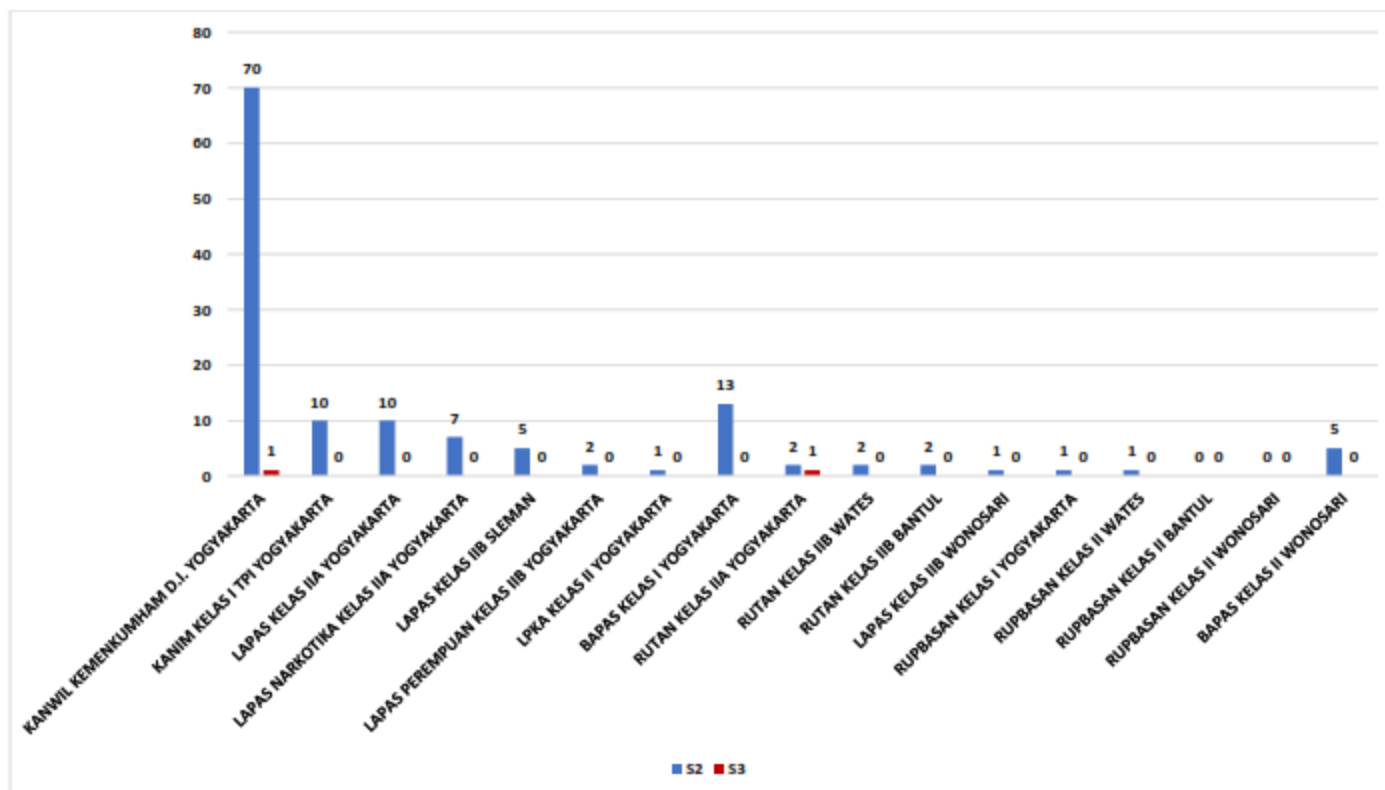
Grafik 1.5 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan













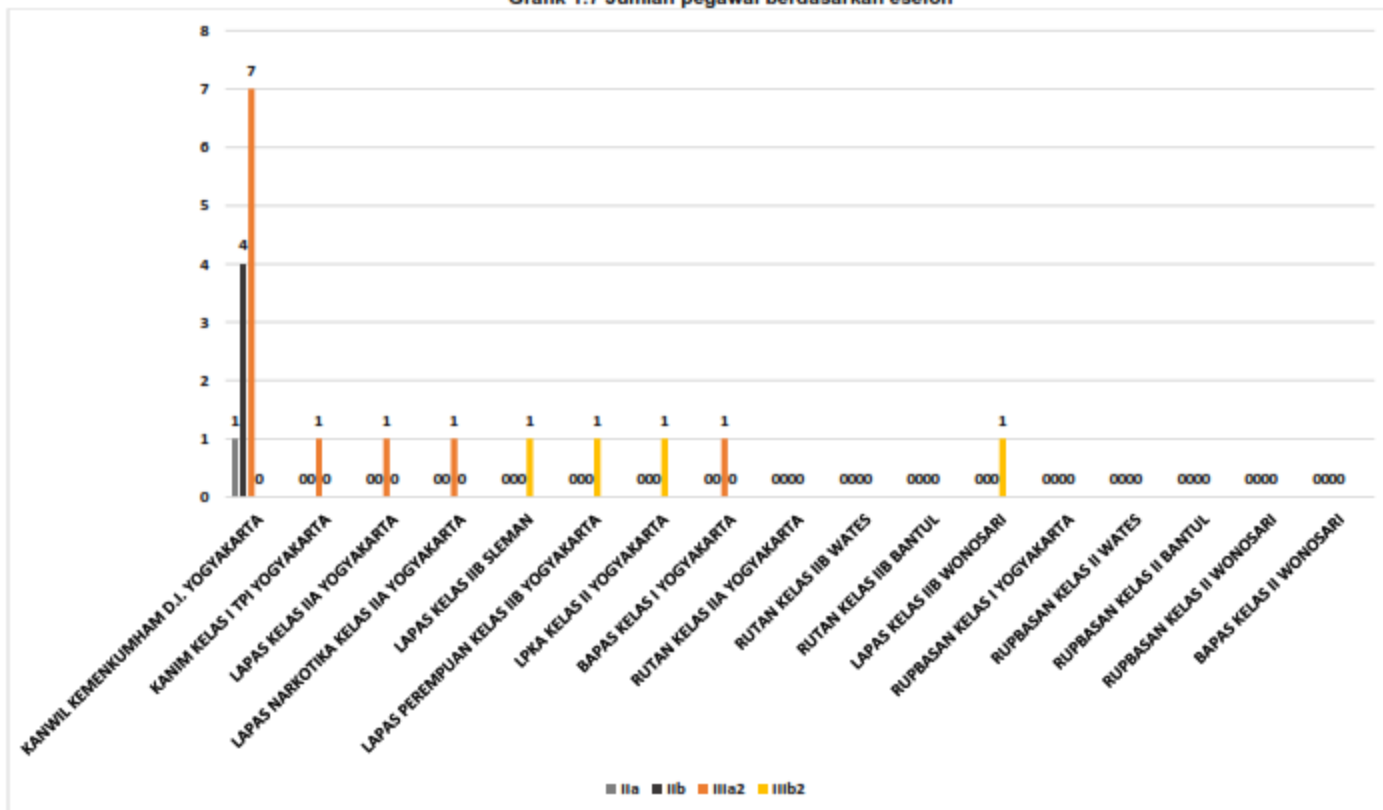
**3) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Eselon****Tabel 1.6 Jumlah pegawai berdasarkan Eselon**

NO	SATUAN KERJA	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I.Y	1	4	7	0	17	0	0
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	0	0	1	0	5	0	11
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	0	0	1	0	5	0	8
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YK	0	0	1	0	5	0	8
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	0	0	0	1	0	4	7
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YK	0	0	0	1	0	4	7
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	0	0	0	1	0	4	8
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	0	0	1	0	0	3	9
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	0	0	0	0	1	0	5
10	RUTAN KELAS IIB WATES	0	0	0	0	1	0	3
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	0	0	0	0	0	1	1
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	0	0	0	1	0	4	8
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	0	0	0	0	1	0	2
14	RUPBASAN KELAS II WATES	0	0	0	0	0	1	1
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	0	0	0	0	0	1	1
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	0	0	0	0	0	1	1
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	0	0	0	0	1	0	3
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>83</b>

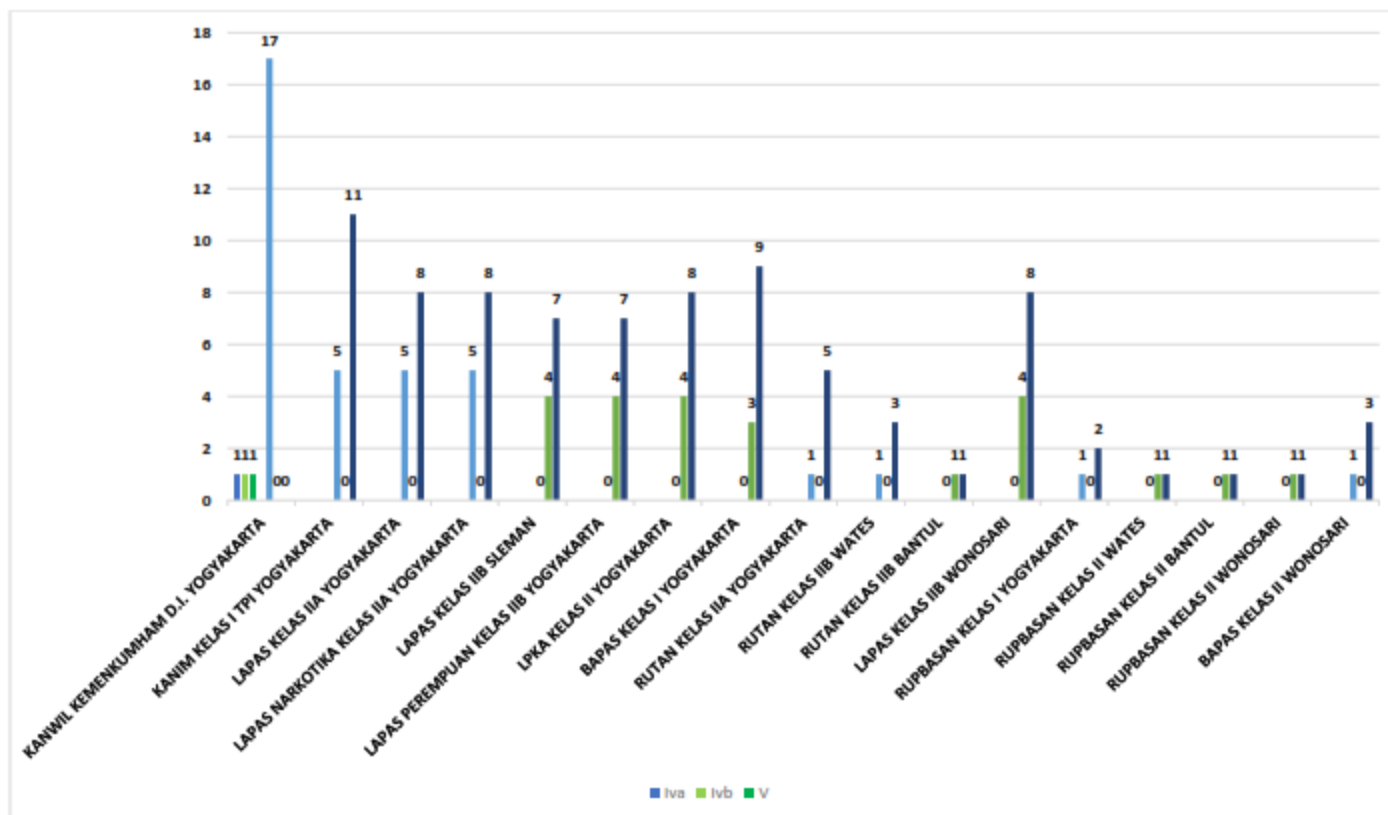




Grafik 1.7 Jumlah pegawai berdasarkan eselon











#### 4) Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah

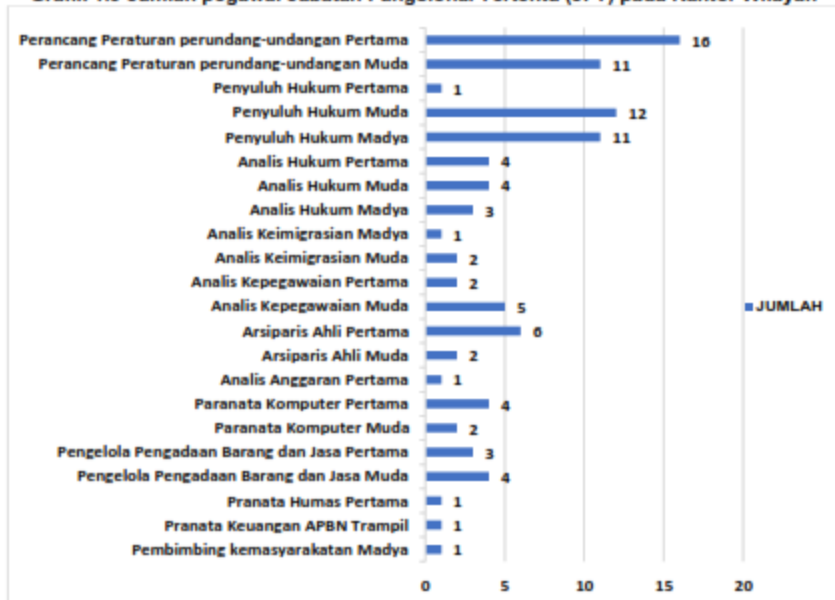
Tabel 1.8 Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama	16
2	Perancang Peraturan perundang-undangan Muda	11
3	Penyuluh Hukum Pertama	1
4	Penyuluh Hukum Muda	12
5	Penyuluh Hukum Madya	11
6	Analisis Hukum Pertama	4
7	Analisis Hukum Muda	4
8	Analisis Hukum Madya	3
9	Analisis Keimigrasian Madya	1
10	Analisis Keimigrasian Muda	2
11	Analisis Kepegawaian Pertama	2
12	Analisis Kepegawaian Muda	5
13	Arsiparis Ahli Pertama	6
14	Arsiparis Ahli Muda	2
15	Analisis Anggaran Pertama	1
16	Paranata Komputer Pertama	4
17	Paranata Komputer Muda	2
18	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	3
19	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	4
20	Pranata Humas Pertama	1
21	Pranata Keuangan APBN Trampil	1
22	Pembimbing kemasyarakatan Madya	1
TOTAL		97





**Grafik 1.9 Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah**



#### 5) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan Golongan

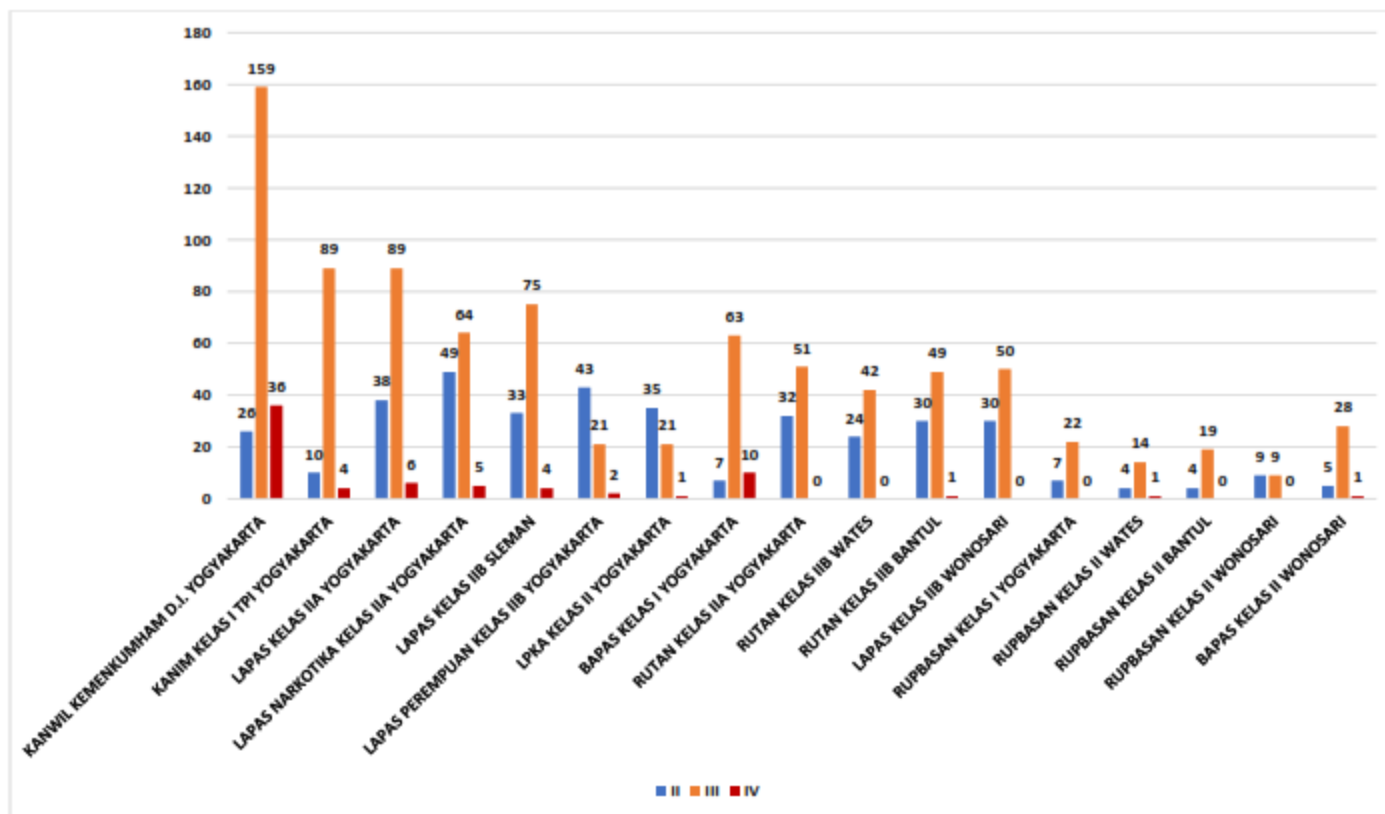
**Tabel 1.10 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan Golongan**

NO	SATUAN KERJA	II	III	IV
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	26	159	36
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	10	89	4
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	38	89	6
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	49	64	5
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	33	75	4
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	43	21	2
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	35	21	1
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	7	63	10
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	32	51	0
10	RUTAN KELAS IIB WATES	24	42	0
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	30	49	1
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	30	50	0
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	7	22	0
14	RUPBASAN KELAS II WATES	4	14	1
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	4	19	0
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	9	9	0
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	5	28	1
<b>TOTAL</b>		<b>386</b>	<b>837</b>	<b>71</b>





Grafik 1.11 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.I. Yogyakarta berdasarkan Golongan







## **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasyarakatan;
- e. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh para koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:





1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta saat ini membawahi sebanyak 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPAS NARKOTIKA), 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 2 (dua) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 4 (empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN), 1 (satu) Kantor Imigrasi (KANIM).

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta :

1. Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama;
2. Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan Muda;
3. Fungsional Penyuluh Hukum Pertama;
4. Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
5. Fungsional Penyuluh Hukum Madya;



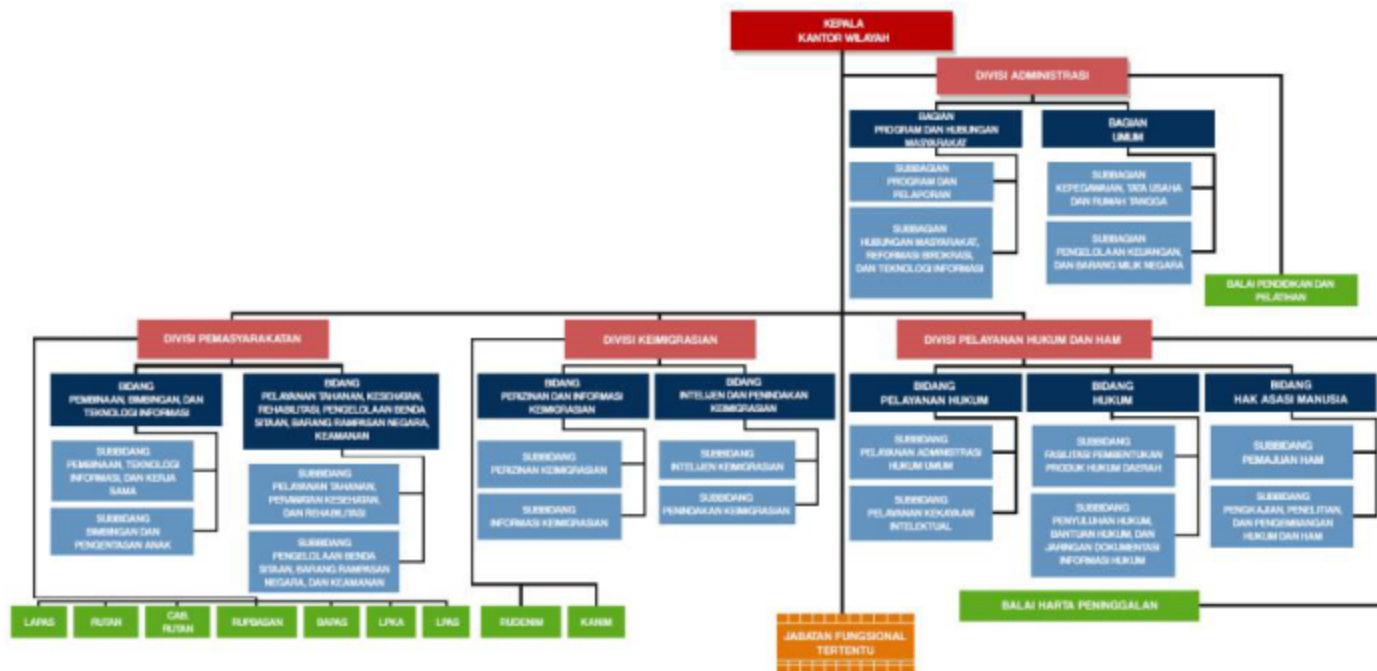


6. Fungsional Analis Hukum Pertama;
7. Fungsional Analis Hukum Muda;
8. Fungsional Analis Hukum Madya;
9. Fungsional Analis Keimigrasian Madya;
10. Fungsional Analis Keimigrasian Muda;
11. Fungsional Analis Kepegawaian Pertama;
12. Fungsional Analis Kepegawaian Muda;
13. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama;
14. Fungsional Arsiparis Ahli Muda;
15. Fungsional Analis Anggaran Pertama;
16. Fungsional Pranata Komputer Pertama;
17. Fungsional Pranata Komputer Muda;
18. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama;
19. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda;
20. Fungsional Pranata Humas Pertama;
21. Fungsional Pranata Keuangan APBN Trampil;
22. Fungsional Pembimbing kemasyarakatan Madya.





Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta







5. Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta terdiri atas 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

**Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta**

**Tabel 1.12 Alamat Kantor Wilayah dan UPT di D.I. Yogyakarta**

No	Unit Pelaksana Teknis	Alamat
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	Jl. Gedongkuning No 146 Yogyakarta 55171 Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	Jalan Solo Km 10 Yogyakarta. Po.Box. 10 YKAP Telp (0274) 487130, 489165Email : <a href="mailto:kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id">kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id</a>
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax (0274) 376126 Email : <a href="mailto:lapasjogja86@yahoo.com">lapasjogja86@yahoo.com</a>
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Kaliurang Km. 17 Yogyakarta Telp. (0274) 895433 Faksimili : (0274) 895422 Email : <a href="mailto:lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id">lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id</a>
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	Alamat Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman 55288 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 867585 Email : <a href="mailto:lapas_sleman@yahoo.co.id">lapas_sleman@yahoo.co.id</a> Website : <a href="http://www.lapassleman.com">www.lapassleman.com</a>
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Email : <a href="mailto:lpjogja2016@yahoo.co.id">lpjogja2016@yahoo.co.id</a>
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="mailto:lpkajogja@gmail.com">lpkajogja@gmail.com</a>
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Godean KM. 9,2 Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta 55564 Telepon : (0274) 2823661 Laman : <a href="http://www.kemenkumham.go.id">www.kemenkumham.go.id</a> Surel : <a href="mailto:bps.yogyakarta@kemenkumham.go.id">bps.yogyakarta@kemenkumham.go.id</a>
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta Telp. (0274) 450247 Fax. (0274) 450248 Email : <a href="mailto:rutanjogja@gmail.com">rutanjogja@gmail.com</a>





10	RUTAN KELAS IIB WATES	Jalan Suparman No. 03 Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773051 Fax (0274) 773015 Email : <a href="mailto:rutanwates@yahoo.co.id">rutanwates@yahoo.co.id</a>
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	Jalan Guwosari Pajangan Bantul Telp. (0274) 6462012 Faks : 6461011 Email : <a href="mailto:rutan.bantul@yahoo.co.id">rutan.bantul@yahoo.co.id</a>
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="mailto:www.wonosarirutan@ymail.com">www.wonosarirutan@ymail.com</a>
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa No. 8 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 419435 – 389170 Email : <a href="mailto:rupbasanyk@gmail.com">rupbasanyk@gmail.com</a> , <a href="mailto:rupbasanyk@yahoo.com">rupbasanyk@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.rupbasanjogja.com">www.rupbasanjogja.com</a>
14	RUPBASAN KELAS II WATES	Jalan Sugiman Gang Bispa No. 1 Wates Telp./Fax : (0274) 7496799, 775322Email : <a href="mailto:rupbasanwates@gmail.com">rupbasanwates@gmail.com</a>
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	Jalan Srandakan Pandak Wijirejo Pandak Bntul 55761 Telp/Faksimile : (0274) 6462376 Email : <a href="mailto:rupbasanbantul@yahoo.com">rupbasanbantul@yahoo.com</a>
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp./Fax : (0274) 394185 Email : <a href="mailto:rupbasan_wonosari@yahoo.com">rupbasan_wonosari@yahoo.com</a>
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 392929 Email : <a href="mailto:bapaswonosari@yahoo.com">bapaswonosari@yahoo.com</a>

### C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai acuan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dalam menyusun laporan kinerja;
- Terdapat keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta;
- Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.





#### **D. Aspek Strategis**



Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta yaitu:

1. Pembentukan Hukum
2. Pelayanan dan Penegakan Hukum
3. Pemajuan Hak Asasi Manusia
4. Dukungan Manajemen

#### **E. Isu Strategis**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015





tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional seluruh aktivitas pemerintah;
2. Penguatan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Central Authority*;
3. Peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan intelektual, dan pemasyarakatan;
5. Rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta peningkatan kesadaran hak asasi manusia;
6. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian.

## **PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta antara lain :





## 1. DIVISI ADMINISTRASI

### Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022

Tabel 1.13 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Administrasi

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kerja belum melakukan input SK PSP kedalam aplikasi SIMAN</li> <li>2. Satuan Kerja belum melakukan input SK PSP kedalam aplikasi SIMAN</li> <li>3. Adanya pergantian operator BMN sehingga usulan Penetapan Status Penggunaan BMN yang sudah dibuat oleh operator lama belum dilanjutkan oleh operator yang baru</li> <li>4. Banyaknya Satuan Kerja yang kurang menyadari adanya ketidaksesuaian realisasi dengan Rencana Penarikan Dana yang tercantum pada Hal III DIPA sehingga berpotensi menimbulkan GAP melebihi 5% yang akan berakibat pada rendahnya nilai indikator Revisi Hal III DIPA</li> <li>5. Banyaknya Satuan Kerja yang belum memahami adanya perubahan target penyerapan anggaran per triwulan yang pada tahun – tahun sebelumnya hanya dihitung 15% dari total realisasi triwulan I, namun sekarang dihitung berdasarkan akun belanja 51 sebesar 20%, belanja 52 sebesar 15% dan belanja 53 sebesar 10% di triwulan I. Hal ini berpotensi pada rendahnya nilai indikator penyerapan anggaran.</li> <li>6. Jangka waktu antara usulan dan terbitnya SK PSP, baik di pengelola barang (KPKNL Yogyakarta) maupun di pengguna barang (Sekretariat Jenderal Kemenkumham)</li> <li>7. Pagu kegiatan belanja barang dan modal terkena blokir (tanda bintang) sehingga satuan kerja tidak dapat merealisasikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara tepat waktu;</li> <li>2. terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil dengan cepat;</li> <li>3. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat waktu;</li> <li>4. Pengamanan BMN pemasangan papan nama untuk Tanah Negara dan Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN sejak usulan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana data terlampir, maka masih ada beberapa Satuan Kerja yang belum melakukan usulan PSP BMN dan ada pula yang sudah melakukan usulan PSP BMN namun Surat Keputusan belum keluar</li> <li>2. Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta TA. 2021 adalah sebesar 95,50.</li> <li>3. Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan. Penghargaan berhasil diraih dalam kontestasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award.</li> <li>4. Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY peringkat terbaik 1 IKPA Award kategori pagu besar (diatas 15 miliar).</li> <li>5. Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY peringkat 3 LKKL Award kategori satuan kerja kecil.</li> <li>6. Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara akurat dan tepat waktu</li> <li>7. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat waktu</li> <li>8. Terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada</li> <li>9. Kanwil DIPA Setjen secara tepat waktu</li> <li>10. Terlaksananya Inventarisasi BMN di seluruh satuan kerja Kanwil</li> </ol>





	<p>anggaran padahal pagu kegiatan yang terkena blokir masuk dalam penghitungan nilai realisasi anggaran sehingga menyebabkan rendahnya nilai realisasi anggaran.</p> <p>8. Realisasi anggaran yang tidak memperhatikan perencanaan (Rencana Penarikan Halaman III DIP) sehingga menyebabkan adanya gap/selisih/ deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana.</p> <p>9. Operator yang kurang tanggap untuk segera mengusulkan PSP karena di UPT operator juga merangkap tugas yang lainnya</p> <p>10. Operator BMN tidak segera melakukan usulan PSP BMN ke Kanwil segera setelah adanya pembelian atau transfer masuk BMN</p> <p>11. adanya gap/selisih/ deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana</p> <p>12. Penggunaan UP/TUP yang tidak maksimal (realisasi belanja UP/TUP tidak sama dengan permintaan UP/TUP)</p>		Kemenkumham D.I. Yogyakarta
Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	<p>1. Sempat terjadi kendala dikarenakan yang melaksanakan kegiatan dan yang menyusun laporan berbeda bagian</p> <p>2. Waktu pelaksanaan kegiatan workshop/sosialisasi mengingat banyaknya kegiatan</p> <p>3. Banyaknya instansi yang berkepentingan terhadap lalu lintas orang, kebijakan instansi yang beragam, beragamnya program dan kegiatan pengawasan, data dan informasi yang tersebar di berbagai instansi, tidak adanya keseragaman standar pelayanan dan prosedur pemeriksaan lalu lintas orang, sistem perlintasan orang yang belum terintegrasi, dan keterbatasan sumber daya (orang, anggaran dan sarana prasarana).</p> <p>4. Unit Pelaksana Teknis belum secara penuh menerapkan dan mempedomani 4 Pilar Kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis</p> <p>5. Pejabat dan Pengelola Arsip belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan</p>	<p>1. Terselenggaranya pelayanan publik di subbag kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;</p> <p>2. Terselenggaranya proses kenaikan pangkat tepat waktu;</p> <p>3. Penyelesaian administrasi surat masuk dan keluar pada subbag kepegawaian.</p>	<p>1. Terselenggaranya pelayanan publik dengan penggunaan Aplikasi berbasis paper less (internal dan eksternal) di subbag kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga</p> <p>2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang kearsipan. Kanwil Kemenkumham DIY meraih Peringkat I Pengawasan Kearsipan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.</p> <p>3. Terselenggaranya proses kenaikan pangkat tepat waktu dengan penggunaan aplikasi berbasis paper less</p> <p>4. Terselenggaranya Proses Pensiun Pegawai yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan aplikasi berbasis paper less.</p> <p>5. Penyelesaian administrasi surat</p>





	<p>peraturan terkait pengelolaan arsip dinamis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar</li> <li>7. Kegiatan sosialisasi belum dapat menghadirkan narasumber baik dari BPKP ataupun dari Inspektorat Jenderal</li> <li>8. Belum adanya akun anggaran khusus untuk pengawasan kearsipan (akun tersendiri);</li> <li>9. Masih kurangnya pemahaman tentang Pengelolaan Kearsipan di Unit Pelaksana Teknis.</li> <li>10. Waktu pelaksanaan yang singkat dan tidak hadirnya kepala satuan kerja baik langsung maupun virtual</li> <li>11. Nilai pengawasan mayoritas mendapat predikat C (kurang).</li> </ol>		masuk dan keluar pada subbag kepegawaian.
<b>Subbagian Program dan Pelaporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Unit Eselon I terkait Penyusunan, Pengelolaan anggaran serta Laporan Perencanaan Anggaran belum terstruktur</li> <li>2. Sering terjadi revisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>3. Perubahan Postur anggaran yang berdampak pada penyusunan RKA-K/L; Ketidakpastiannya waktu penganggaran;</li> <li>4. Belum adanya SOP penyelesaian TLHP Audit Itjen maupun Pemeriksaan BPK</li> <li>5. Kurangnya koordinasi satker yang terdapat temuan dalam kesesuaian pemenuhan rekomendasi penyelesaian</li> <li>6. Kurang optimalnya peran satgas SPIP dalam melakukan pemantauan pengawasan kegiatan pengendalian</li> <li>7. Terdapat ketidaksesuaian Format penyusunan laporan sesuai dengan Permenkumham yang berlaku</li> <li>8. Pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan tuisi pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja masih belum optimal sehingga masih berpotensi terjadinya kesalahan dalam penggunaan akun belanja modal yang tidak sesuai</li> <li>9. Belum adanya pendampingan dalam penyusunan Penilaian Lembar Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian kinerja tahun 2021;</li> <li>2. Analisa kebutuhan Anggaran dan Rencana Kerja TA 2021;</li> <li>3. Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas serta Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>4. Penelitian Pagu Indikatif TA 2022;</li> <li>5. Rapat evaluasi serapan anggaran semester I;</li> <li>6. Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA 2022;</li> <li>7. Rapat Evaluasi Semester II TA 2021;</li> <li>8. Menyusun DB, PP, dan kalender kerja;</li> <li>9. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan Tahun 2023;</li> <li>10. Tersusunnya berbagai Laporan pada Kantor Wilayah (Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2021, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Target Kinerja);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kantor Wilayah yang dipimpin Imam Jauhari itu berhasil meraih penghargaan Terbaik II atas Kinerja Berdasarkan Parameter IKPA, SMART, Nilai SAKIP, Nilai WBK/WBBM, dan Target Kinerja.</li> <li>2. Perjanjian kinerja tahun 2022;</li> <li>3. Analisa kebutuhan Anggaran dan Rencana Kerja TA 2023;</li> <li>4. Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas serta Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>5. Penelitian Pagu Indikatif TA 2023;</li> <li>6. Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA 2023;</li> <li>7. Rapat Evaluasi Semester II TA 2022;</li> <li>8. Menyusun DB, PP, dan kalender kerja;</li> <li>9. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan Tahun 2023;</li> <li>10. Tersusunnya berbagai Laporan pada Kantor Wilayah (Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Target Kinerja);</li> <li>11. Terlaksananya Monitoring Penginputan</li> </ol>





	<p>Evaluasi SPIP pada satuan kerja dikarenakan belum terdapat petunjuk teknis dalam penyusunan di tingkat Unit Pelaksana Teknis</p> <p>10. LHE penilaian Mandiri Maturitas SPIP belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta</p> <p>11. Kurangnya koordinasi Penyelenggaraan SPIP di kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta</p>		<p>pelaporan SMART, E Monev, dan E Performance</p> <p>12. Terlaksananya monitoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022.</p> <p>13. Terlaksananya pelaporan Target Kinerja Tahun 2022 secara tepat waktu.</p>
<p><b>Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi</b></p>	<p>1. Belum tersedianya alokasi anggaran khusus pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! seperti anggaran peningkatan kompetensi petugas layanan pengaduan.</p> <p>2. Terdapat ketidaksesuaian Format penyusunan laporan sesuai dengan Permenkumham yang berlaku</p> <p>3. Kurangnya tingkat pemahaman dari masing-masing unit pemilik risiko dalam mengidentifikasi risiko, penyebab dampak serta bentuk pengendaliannya</p> <p>4. Pengendalian risiko yang telah disusun dalam Matriks Manajemen Risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan tugas dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko</p> <p>5. Belum dilakukannya sosialisasi terhadap hasil dari proyek perubahan "Aplikasi Dataku" dikarenakan masih diperlukan pengembangan fitur pada aplikasi dimaksud.</p> <p>6. Pengendalian risiko yang telah disusun dalam Matriks Manajemen Risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan tugas dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko</p>	<p>1. Terlaksananya pengelolaan Website, Videotron, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta;</p> <p>2. Terlaksananya berbagai kegiatan teleconference sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terutama selama masa Pandemi Covid 19;</p> <p>3. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll)</p>	<p>1. Terlaksananya pengelolaan Website, Videotron, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta;</p> <p>2. Terlaksananya berbagai kegiatan teleconference sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terutama selama masa Pandemi Covid 19;</p> <p>3. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll)</p>





## 2. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

### Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022

Tabel 1.14 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
<b>Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/hybrid</li> <li>2. Karena banyaknya Notaris yang tidak paham dalam pengisian CDD dan EDD. Sehingga resiko para Notaris menjadi tinggi dan sangat tinggi.</li> <li>3. Banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi AHU Online dalam pendaftaran Perseroan Perorangan</li> <li>4. Susahnya mengumpulkan berkas yang sudah lama, mengingat pengarsipan masih belum maksimal</li> <li>5. Kurang pahamnya para Notaris dalam pengisian formulir SRA sehingga membuat tingkat resiko Notaris menjadi tinggi dan sangat tinggi.</li> <li>6. Kaitan Perseroan Perorangan masih banyak pelaku usaha yang tidak mau mendaftar PP karena takut terhadap pengenaan pajak.</li> <li>7. Kaitan dengan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Layanan AHU secara Online.</li> <li>8. Pengarsipan Database para PPNS yang tidak baik membuat kesulitan dalam pencarian data.</li> <li>9. Kendala terdapat pada layanan partai Politik terutama Partai Politik baru, dikarenakan ada alamat Parpol yang masih menggunakan alamat fiktif.</li> <li>10. Pengarsipan berkas data pada Kantor wilayah dan instansi terkait masih belum maksimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/ Desiminasi Benefecial Ownership Royal Ambarukmo Plaza Senin, 12 April 2021</li> <li>2. Rakor MPW/MPD Peride I Royal Ambarukmo Plaza Kamis, 25 Maret 2021</li> <li>3. Pelantikan Notaris Pengganti Ruang Kepala Kantor Wilayah Jum'at, 4 Juni 2021</li> <li>4. Pengambilan sumpah Kewarganegaraan Ruang Aula Kantor Wilayah Jum'at 17 September 2021</li> <li>5. Sosialisasi Perseroan Perorangan Hotel East Parc Yogyakarta Selasa, 16 November 2021</li> <li>6. Rakor MPW/MPD Periode II Tahun 2021 Hotel East Parc Yogyakarta Jum'at-Sabtu, 19-20 November 2021</li> <li>7. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Jum'at, 29 Oktober 2021</li> <li>8. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Senin, 29 November 2021</li> <li>9. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Kamis, 2 Desember 2021</li> <li>10. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Jum'at, 3 Desember 2021</li> <li>11. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Selasa, 7 Desember 2021</li> <li>12. Pelantikan Notaris Baru/Notaris Pengganti Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan Pengusaha Wanita Kamis, 9 Desember 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepatuhan Terhadap Profesi Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Rabu, 2 Maret 2022 14.00 WIB s/d selesai</li> <li>2. Penanganan permasalahan kenotariatan pada MKNW</li> <li>3. Koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>4. Koordinasi dengan unit pusat</li> <li>5. Layanan Kewarganegaraan</li> <li>6. Pelantikan PPNS</li> <li>7. Pelantikan Notaris</li> <li>8. Layanan AHU lainnya</li> <li>9. Migrasi data layanan AHU</li> <li>10. Rakor MPW dan MPD</li> <li>11. Diseminasi</li> <li>12. Sosialisasi Perseroan Perorangan</li> <li>13. Publikasi/Pameran/Helpdesk</li> <li>14. Pengawasan kenotariatan pada MPD</li> </ol>
<b>Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa inovasi di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi-potensi yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan baik secara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta</li> </ol>





	<p>ada yaitu secara administrative Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota. Tersebar sebanyak 1.300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Jumlah permohonan semakin meningkat dan kegiatan implementasi kerjasama yg semakin banyak, terkendala jumlah SDM pada subbidang Pelayanan KI</li><li>3. Penyusunan deskripsi IG jambu Dalhari terkendala penentuan pemeriksa lab standart internasional yang berada diluar wilayah yogyakarta</li><li>4. Akses data hasil kuesioner yang masuk sebagai penilaian kelayakan pusat perbelanjaan</li><li>5. Kuota peserta Drafting Patent Camp dinilai kurang banyak</li><li>6. Dalam penyusunan draft Deskripsi Indikasi Geografis dibutuhkan uji laboratorium yang berbiaya mahal</li><li>7. MIC tidak dianggarkan secara khusus sehingga membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder lain</li><li>8. Penyebaran kuesioner membutuhkan sampling yang banyak</li></ol>	<p>langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang kekayaan intelektual dan permohonan saksi ahli oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta dan merek Senin, 25 Januari 2021</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan baik secara langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang kekayaan intelektual dan permohonan saksi ahli oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta dan merek Senin, 26 April 2021</li><li>3. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan baik secara langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang kekayaan intelektual dan permohonan saksi ahli oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta dan merek Selasa, 18 Mei 2021</li><li>4. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia" oleh Kantor Wilayah, dengan Narasumber Agung Damar Sasongko selaku Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Yessy Gunawan selaku Komisioner dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan Cristopor Yulianto selaku General Manajer Hotel Tentrem Yogyakarta serta diikuti oleh 50 peserta terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>1) pengelola pusat perbelanjaan</li><li>2) pengelola tempat karaoke</li><li>3) pengelola tempat wisata/rekreasi</li></ol></li></ol>	<p>telah melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan 14 Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>2) Universitas Gajah Mada</li><li>3) Universitas Negeri Yogyakarta</li><li>4) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</li><li>5) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li><li>6) Universitas Alma Ata</li><li>7) UPN Veteran Yogyakarta</li><li>8) Universitas Atma Jaya Yogyakarta</li><li>9) Institut Seni Indonesia Yogyakarta</li><li>10) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</li><li>11) Politeknik Kesehatan Yogyakarta</li><li>12) Universitas Amikom Yogyakarta</li><li>13) Universitas Janabadra Yogyakarta</li><li>14) Universitas Mercubuana Yogyakarta</li></ol> <p>2. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema "Mendorong Potensi Indikasi Geografis di DIY : Tantangan dan Rencana Aksi" berjumlah 60 orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta;</li><li>2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Yogyakarta;</li><li>3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman;</li><li>4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;</li><li>5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulonprogo;</li><li>6) Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul;</li><li>7) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>8) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman;</li><li>9) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul;</li></ol>
--	---	---	---





		<p>4) pengelola cafe dan restoran</p> <p>5) manajemen TV/radio</p> <p>6) Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual</p> <p>7) Kepolisian Daerah DIY</p> <p>8) dan PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Hotel Tentrem Yogyakarta Senin, 26 April 2021</p> <p>5. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema "Intellectual Property : To Promote, To Serve, To Protect" oleh Kantor Wilayah, dengan Narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Akademisi Universitas Janabadra Yogyakarta, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti oleh 50 peserta terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, UMKM se-DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY The Westlake Resort Yogyakarta Kamis, 19 Agustus 2021</p> <p>6. Kerjasama Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema "Pelindungan Program Komputer Dan Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0" oleh Kantor Wilayah, dengan Narasumber Prof. Dr. Kusnini, M.Kom dari Universitas Amikom Yogyakarta, Agung Damarsasongko dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan AKBP Rianto, S.H. dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta diikuti oleh 60 peserta terdiri dari;</p> <p>1) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>	<p>10) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>11) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>12) Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta;</p> <p>13) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman;</p> <p>14) Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;</p> <p>15) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo;</p> <p>16) Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>17) Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>18) Bappeda Kabupaten Sleman;</p> <p>19) MPIG Salak Pondoh Sleman;</p> <p>20) MPIG Gula Kelapa Kulonprogo;</p> <p>21) MPIG Batik Nitik Yogyakarta;</p> <p>22) MPIG Jambu Dalhari Sleman;</p> <p>23) MPIG Gerabah Kasongan Bantul;</p> <p>24) MPIG Kopi Merapi Sleman;</p> <p>25) PPNS Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>26) Pegawai Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>3. Koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman ini dilaksanakan sebagai langkah awal terkait penilaian potensi Jambu Dalhari untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Rabu-Jumat, 2-4 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB s/d selesai</p> <p>4. Pelaksanaan sosialisasi dan audiensi potensi Indikasi Geografis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Bappeda Kabupaten Sleman pada tanggal</p>
--	--	--	--





		<p>2) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>4) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>5) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>6) PPNS Kanwil Kemenkumham DIY;</p> <p>7) Pranata Komputer Kanwil Kemenkumham DIY;</p> <p>8) Sentra KI Universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta; Hotel Grand Aston Yogyakarta Kamis, 16 September 2021</p> <p>7. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Queen Resort Kamis, 20 Mei 2021</p> <p>8. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual HehaSky Jum'at, 21 Mei 2021</p> <p>9. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe</p>	<p>7 April 2022.</p> <p>5. Berdasarkan pengamatan dilapangan pada pusat perbelanjaan yang telah diberikan kuesioner dan penilaian hasil kuesioner yang masuk menunjukan bahwa terdapat 5 (lima) Mall sebagai pusat perbelanjaan yang memenuhi persyaratan layak serta dan dapat dikategorikan mendapatkan sertifikasi pusat perbelanjaan, sebagai berikut :</p> <p>1) Jogja City Mall</p> <p>2) Hartono Mall Yogyakarta</p> <p>3) Malioboro Mall</p> <p>4) Plaza Ambarrukmo</p> <p>5) Sleman City Hall</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi persiapan Mobile IP Clinic dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dengan stakeholder Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Advokasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2022 bertempat di Hotel Lynn Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2022.</p> <p>8. Hasil analisa menunjukan dan merekomendasikan 7 (tujuh) Mall tersebut patut dan layak mendapatkan sertifikat pusat perbelanjaan, sebagai berikut :</p> <p>1) Jogja City Mall</p> <p>2) Hartono Mall Yogyakarta</p> <p>3) Malioboro Mall</p> <p>4) Plaza Ambarrukmo</p> <p>5) Sleman City Hall</p> <p>6) Lippo Plaza Jogja</p> <p>7) Galeria Mall</p> <p>9. Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) / Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 8-12 Agustus 2022 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna dan Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta</p> <p>10. Kegiatan Edukasi dan Advokasi Kekayaan</p>
--	--	--	--





		<p>dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Sugar Executive Club Selasa, 25 Mei 2021</p> <p>10. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Radio Star Jogja FM and Karaoke Selasa, 25 Mei 2021</p> <p>11. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Turgo Family Karaoke Selasa, 25 Mei 2021</p>	<p>Intelektual sebagai implementasi Perjanjian Kerjasama antara DJKI dengan Pemda DIY pada pasal 2 terkait Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi di bidang Kekayaan Intelektual bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal 20 September 2022</p> <p>11. Koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya Bappeda Kabupaten Sleman dan MPIG Jambu Air Dalhari pada tanggal 22 September 2022</p> <p>12. Implementasi perjanjian Kerjasama di bidang pemanfaatan kekayaan intelektual tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis Perencanaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggandeng 13 Perguruan Tinggi dan 1 Pemerintah Daerah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta</li><li>2) Universitas Gajah Mada</li><li>3) Universitas Negeri Yogyakarta</li><li>4) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</li><li>5) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</li><li>6) Universitas Alma Ata</li><li>7) UPN Veteran Yogyakarta</li><li>8) Universitas Atma Jaya Yogyakarta</li><li>9) Institut Seni Indonesia Yogyakarta</li><li>10) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</li><li>11) Politeknik Kesehatan Yogyakarta</li><li>12) Universitas Amikom Yogyakarta</li><li>13) Universitas Janabadra Yogyakarta</li><li>14) Universitas Mercubuana Yogyakarta</li></ol> <p>13. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan baik secara langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang kekayaan intelektual dan permohonan saksi ahli oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta dan merek</p>
--	--	---	--





			<p>diantaranya permintaan mediasi kasus pelanggaran merek "Ndalem" pada tanggal 26 April 2022 dan permintaan mediasi kasus pelanggaran hak cipta buku "LovRinz" pada tanggal 8 Desember 2022.</p> <p>14. Kerjasama Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema "Sertifikasi Pusat Perbelanjaan sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual" oleh Kantor Wilayah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 bertempat di Hotel Indoluxe Yogyakarta.</p> <p>Narasumber kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</li><li>2) Kepolisian Daerah DIY;</li><li>3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;</li><li>4) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DIY.</li></ol> <p>Sedangkan peserta berjumlah 100 orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kepolisian Daerah DIY</li><li>2) Kepolisian Resort se-DIY</li><li>3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan se-DIY</li><li>4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-DIY</li><li>5) Dinas Pariwisata se-DIY</li><li>6) Manajemen Pusat Perbelanjaan se-DIY</li><li>7) PPNS Kanwil Kemenkumham DIY</li></ol> <p>15. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema "Urgensi Pelindungan Kekayaan Intelektual Pada Sektor Properti" oleh Kantor Wilayah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Hotel Eastparc Yogyakarta.</p>
--	--	--	---





			<p>Narasumber kegiatan ini berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktorat Penyelesaian Sengketa DJKI dan Penyelesaian Sengketa DJKI</li> <li>2) DPP APERSI DIY</li> <li>3) Akademis dari Universitas Janabadra Yogyakarta</li> </ol> <p>Peserta berjumlah 80 orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Real Estate Indonesia DIY</li> <li>2) Apersi DIY</li> <li>3) Appemas DIY</li> <li>4) APSI DIY</li> <li>5) Ikatan Arsitek DIY</li> <li>6) Dinas Pemukiman dan Pekerjaan Umum DIY</li> <li>7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY</li> <li>8) Dinas Koperasi dan UKM DIY</li> <li>9) Kepolisian DIY</li> <li>10) Korwas PPNS Polda DIY</li> <li>11) Kejaksaan Tinggi DIY</li> <li>12) PPNS Kanwil Kemenkumham DIY</li> </ol> <p>16. Penyerahan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.</p> <p>17. Penyerahan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 bertempat di Hotel Eastparc Yogyakarta kepada 7 (tujuh) pusat perbelanjaan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lippo Plaza Jogja</li> <li>2) Malioboro Mall</li> <li>3) Hartono Mall</li> <li>4) Ambarrukmo Plaza</li> <li>5) Sleman City Hall</li> <li>6) Galeria Mall</li> <li>7) Jogja City Mall</li> </ol> <p>18. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola</p>
--	--	--	---





			<p>pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual, dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya Hotel Dafam Signature, Hotel Santika Wonosari, Sleman City Hall, Jogja City Mall dan sebagainya.</p> <p>19. Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan upaya kerja sama dalam rangka penanganan kasus pelanggaran kekayaan intelektual serta menghimpun data-data terkait kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang telah ditangani penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022.</p>
<p><b>Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, surat balasan (pengisian matrik Monev) dari Pemerintah Kabupaten/Kota telah diterima Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta</li> <li>2. Proses pembinaan suatu Kelurahan/ kalurahan sadar hukum di DIY belum sepenuhnya terlaksana 100%, masih terdapat 12% dari jumlah Kelurahan/ kalurahan yang belum dilakukan pembinaan hal tersebut terhalang dengan kondisi Geografis dan Demografis dari Kelurahan/ Kalurahan tersebut, sehingga JFT Penyuluh Hukum kurang optimal dalam melakukan pembinaan kepada Kelurahan/ Kalurahan tersebut.</li> <li>3. Belum adanya koordinasi tentang pelaksanaan tarja Eselon I (BPHN) yang harus dilaksanakan juga oleh Kantor Wilayah.</li> <li>4. Mohon adanya kesesuaian anggaran untuk kegiatan Peresmian Kelurahan/Kalurahan Sadar Hukum pada KRO Fasilitas Kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Kontrak Direktur OBH dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2021 Jumat, 22 Januari 2021 Aula Kanwil kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta</li> <li>2. Virtual Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi bantuan Hukum Periode 2022-2024 10, 18, 19 februari Aula Kanwil kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta</li> <li>3. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH Senin, 8 Maret 2021 Bagian Hukum Kabupaten Bantul Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Rabu, 31 Maret 2021 Den Nany Garden Restaurant Jl. Taman Siswa No. 75 Yogyakarta</li> <li>4. Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah di satuan kerja Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan, Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s/d 2024) Selasa, 27 April 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyusunan Hasil Evaluasi Desa Sadar Hukum Berdasarkan Syarat Administratif berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-04 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi serta Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2022 Pukul 09.00 – 12.00 WIB Ruang Rapat Kantor Wilayah</li> <li>2. Telah dilakukan penyerasian database Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan database Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari sejumlah 168 (sembilan puluh sembilan) desa/kelurahan yang ada di database sebanyak 84 (delapan puluh empat) sudah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, 11 (sebelas) desa/kelurahan belum diresmikan, serta 69 (enam puluh sembilan) desa/kelurahan yang akan diresmikan sebagai Desa/Kelurahan</li> </ol>





	Desa Sadar Hukum.	<p>Pengawasan dan Evaluasi Pemeriksaan Vaktual/ Survey Lapangan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Kamis, 03 Juni 2021 Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Senin, 7 Juni 2021 Den Nany Garden Restaurant Jl. Taman Siswa No. 75 Yogyakarta Melaksanakan</p> <p>5. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan JDIH, Perpustakaan Hukum Kamis, 01 Juli 2021 Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo</p> <p>6. Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan, Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s/d 2024); Jumat, 27 Agustus 2021</p> <p>7. Verifikasi Faktual Dokumen OBH Rapat Paripurna Pembentukan Kalurahan Sadar Hukum (Kadarkum) Kamis, 19 Agustus 2021 Warung Bu Baha Jl. Garuda No. 3 Jogoragan, Kotagede, Yogyakarta</p> <p>8. Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah Selasa, 05 Oktober 2021 Rutan Wonosari dan LPP Yogyakarta</p> <p>9. Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Oktober – Desember 2021</p> <p>1) Telah dilaksanakan 93 (sembilan puluh tiga) kegiatan bantuan hukum litigasi oleh 21 (dua puluh satu) OBH Terakreditasi Periode 2019-2021 yang berupa kegiatan bantuan hukum litigasi perkara pidana dan perkara perdata pada tahap penyidikan dan persidangan;</p> <p>2) Telah dilaksanakan 48 (empat puluh delapan) kegiatan bantuan hukum non litigasi oleh 21 (dua puluh satu) OBH Terakreditasi Periode 2019-2021 yang berupa kegiatan penyuluhan hukum, penelitian hukum, pendampingan di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, negosiasi, mediasi, konsultasi hukum, investigasi kasus, dan drafting dokumen.</p>	<p>Sadar Hukum pada 23 Juni 2022 mendatang.</p> <p>Adapun perincian dari sebanyak 84 (delapan puluh empat) Desa/Kelurahan yang sudah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1) 32 (tiga puluh dua) desa/kelurahan diresmikan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.KP.07.05 Tahun 2011 pada tanggal 12 Februari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182/KEP/2010 tanggal 31 Juli 2010; dan</p> <p>2) 52 (lima puluh dua) desa/kelurahan diresmikan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.KP.07.05 Tahun 2013 pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KEP/2013 tanggal 27 Maret 2013.</p> <p>3. Adapun 69 (enam puluh Sembilan) desa/kelurahan yang akan diresmikan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan telah diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM</p> <p>4. Adapun 11 (sebelas) desa/kelurahan belum dilakukan pembinaan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum</p> <p>5. Penandatanganan prasasti peresmian kalurahan/kelurahan sadar hukum secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta disaksikan oleh Wakil</p>
--	-------------------	--	--





			<p>Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Para Kepala Divisi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>6. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Kalurahan / Kelurahan berupa piagam kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>2) Bupati Bantul;</li> <li>3) Bupati Sleman melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;</li> <li>4) Bupati Gunungkidul melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;</li> <li>5) Bupati Kulonprogo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo;</li> <li>6) Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> </ol> <p>7. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Kalurahan / Kelurahan berupa medali kepada 13 (tiga belas) Mantri Pamong Praja beserta 21 (dua puluh satu) Panewu se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan;</p> <p>8. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Kalurahan / Kelurahan berupa medali kepada 69 (enam puluh sembilan) Lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan</p> <p>9. Penyerahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.KP.05.03 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Panewu/Mantri, beserta Lurah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan</p>
--	--	--	---





			10. Pemberian hadiah kepada 69 (enam puluh sembilan) Lurah yang Kalurahan/Kelurahannya ditetapkan sebagai Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2022.
<b>Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>	<p>1. Terkait kelengkapan pengajuan permohonan untuk harmonisasi Perda tidak semua lengkap. ada beberapa peraturan daerah yang tidak dilengkapi Naskah akademik maupun ketetapan penjelasan.</p> <p>2. Proses harmonisasi di kantor wilayah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP dan untuk SOP harmonisasi belum dikomunikasikan kepada semua perancang.</p> <p>3. Adanya tumpang tindih kewenangan antara kantor wilayah dengan biro hukum dalam pelaksanaan harmonisasi dengan mekanisme evaluasi produk hukum yang ada di Biro hukum.</p> <p>4. Perlu dilakukan pembahasan SOP terkait pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022</p> <p>5. Anggaran dan jumlah ruang rapat di Kanwil tidak dapat mencukupi kebutuhan rapat harmonisasi JF Perancang, mana dalam sehari dapat melaksanakan 5 kali rapat</p> <p>6. Keterbatasan sarana dan prasarana khususnya jumlah ruang rapat di Kanwil tidak dapat mencukupi kebutuhan rapat harmonisasi dibandingkan dengan semakin banyaknya permohonan harmonisasi yang masuk ke kantor wilayah.</p> <p>7. Keterbatasan SDM pelaksana baik Perancang maupun JFU sebagai pengadmitrasi</p>	<p>1. Raker Bapemperda membahas Raperda Inisiatif DPRD Kab. Sleman tahun 2021 Ruang Sekretariat DPRD Kab. Sleman Selasa, 05 Januari 2021</p> <p>2. Rapat Koordinasi Kajian Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul tahun 2021 Ruang Rapat Bagian Hukum Kab. Gunungkidul Jumat, 26 Februari 2021</p> <p>3. Rapat Kajian Beberapa Peraturan tentang Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah terkait dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya Ruang Rapat Lt. 2 DPMPTT Kab. Gunungkidul Rabu, 17 Maret 2021</p> <p>4. Rapat Audit Kinerja Kepariwisata DIY (Pembagian Kewenangan di Daerah terkait Pariwisata) Ruang Rapat Dinas Pariwisata DIY Senin, 28 Maret 2021</p> <p>5. Rapat Pengumpulan Data Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Raperda dengan tema Inventarisasi Materi terhadap Pemantauan dan Peninjauan UU Cipta Kerja di DIY Ruang Rapat Lt. I Biro Hukum Setda DIY Rabu, 31 Maret 2021</p> <p>6. Rapat Identifikasi Perda/Perkada Tindak Lanjut UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Ruang Rapat Lt. I Biro Hukum Setda DIY Kamis, 01 April 2021</p> <p>7. Rapat Pendampingan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Ruang Rapat A Biro Hukum Setda DIY Rabu, 07 April 2021</p> <p>8. Rapat Inventarisasi Produk Hukum Berkaitan dengan Kemudahan Perizinan Berusaha Tindak Lanjut PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Ruang Rapat Bagian Hukum Kota Yogyakarta Jumat. 09 April 2021</p>	<p>1. Rapat Koordinasi dengan Bapemperda DPRD DIY terkait propemperda Tahun 2022 Senin, 24 Januari 2022 Pukul 13.00 wib Tempat di Ruang Rapat</p> <p>2. Melakukan Harmonisasi terhadap Perancangan Peraturan Daerah, a. Raperda tentang Covid, b. Raperda tentang Utilitas, c. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Melakukan Pemetaan terhadap 27 Rancangan Peraturan Daerah sesuai Surat Keputusan Propemperda tahun 2022</p> <p>4. Melakukan Kajian Perda tentang Ketertiban Umum</p> <p>5. Melakukan kegiatan penilaian angka kredit bagi perancang peraturan perundang-undangan dengan memberikan sosialisasi terhadap perancang terkait penilaian angka kredit secara elektronik dan butir-butir kegiatan perancang peraturan perundang-undangan.</p>





		<p>9. Rapat Kajian Perda dan Perkada Dinas PU Kab. Gunungkidul Aula DPUPRKP Kab. Gunungkidul Senin, 12 April 2021</p> <p>10. Raker Komisi A DPRD DIY penyusunan rekomendasi atas status kedudukan staf pamong kalurahan Ruang Rapat Paripurna Lt. II DPRD DIY Rabu, 05 Mei 2021</p> <p>11. Review Perdas No. 1 Th. 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY sebagai tindak lanjut PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Ruang Rapat Lt. 2 Biro Hukum Setda DIY Kamis, 03 Juni 2021</p> <p>12. Rapat Identifikasi dan Kajian atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Jumat, 4 Juni 2021</p> <p>13. Rapat Penerimaan Kunjungan DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Studi Banding mengenai Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ruang Rapat Lt. 1 Biro Hukum Setda DIY Kamis, 10 Juni 2021</p>	
<b>Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM di ruang layanan, karena petugas layanan juga melaksanakan tugas dan fungsi administratif fasilitatif</li> <li>2. Diberlakukannya system online sehingga jumlah pengunjung sebagai responden sangat terbatas</li> <li>3. Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas penelitian ini mampu mengeksplorasi dan mengklarifikasi potensi pelanggaran yang terjadi dengan pada berdasarkan situasi sosial yang ada saat ini, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahwa kebijakan M-Paspor merupakan bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan sasaran strategi dan rencana aksi dalam</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Senin 1 Maret 2021 Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di Wilayah Selasa, Jum'at, Jum'at, 26 Januari, 26 Februari, 26 Maret Ruang Rapat dan Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Perspsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Jum'at, Jum'at, Senin 29 Januari, 26 Februari, 29 Maret Ruang Rapat dan Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran kegiatan pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan ham di wilayah pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>2. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik</li> <li>3. Hasil penelitian dan kajian pada tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.</li> </ol>





	<p>bidang Keimigrasian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-1.PR.01.03 Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah dan hak konstitusi masyarakat;</p> <p>2) Bahwa berdasarkan tingkatan pengembangan, aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi super app berbeda dengan aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi APAPO;</p> <p>3) Bahwa fasilitas dan kemudahan pelayanan melalui aplikasi M- Paspor ini belum dapat diakses dan dimanfaatkan oleh WNI yang tinggal dan berada di luar negeri;</p> <p>4) Fitur yang terdapat dalam aplikasi M-Paspor belum mengakomodir perlindungan kepada anak-anak dan perempuan yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang;</p> <p>4. Bahwa kebijakan SPBE dalam layanan paspor biasa berpotensi tidak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat adat yang belum mampu menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>5. Kurangnya pengawasan dan pengendalian Internal Petugas pelayanan public;</p> <p>6. Pegawai bisa memiliki akun layanan sehingga dapat melakukan praktek percaloan diluar jam layanan;</p> <p>7. Pembinaan terhadap pegawai yang melanggar etika kurang efektif.</p> <p>8. Belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, dan Lembaga penilaian aset HKI</p>	<p>Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>4. Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kamis 04 Februari 2021. Ruang Kerja PimTi, Ruang Rapat, Ruang Kerja Narasumber, Ruangan Masing-masing peserta</p> <p>5. Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Selasa, 27 April 2021 Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta</p> <p>6. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di Wilayah Rabu, 28 April 2021 Ruang Rapat Kanwil</p> <p>7. Rapat Pembahasan Laporan Analisis kebijakan dan reporting pemanfaatan SIPKUMHAM April 2021</p> <p>8. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Perspsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Kamis, Kamis, Jumat 29 April, 28 Mei, 24 Juni 2021 Ruang Rapat Kanwil</p>	
<b>Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia</b>	<p>1. Belum tersedianya database penyandang disabilitas beserta kompetensinya dan lowongan kerja yang sesuai dengan ragam-ragam disabilitas.</p> <p>2. Keterbatasan fasilitas/akomodasi untuk penyandang disabilitas</p>	<p>1. Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan program Pemajuan HAM dan Penegakan HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil peserta 15 orang Rabu, 3 Februari 2021</p> <p>2. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian</p>	<p>1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.</p> <p>2. Memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja agar nilai hasil survey IPK IKM dan integritas bisa maksimal guna</p>





	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penanggung jawab pelaporan KKPHAM pada Kabupaten Kota bayak berubah dan baru</li> <li>4. Masih banyaknya data Kabupaten kota yang belum sesuai dengan Indikator</li> <li>5. Penanggung jawab pelaporan KKPHAM pada Kabupaten Kota bayak berubah dan baru</li> <li>6. Beberapa surat koordinasi belum mendapat tanggapan dan balasan dari instansi terkait           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan RANHAM di Daerah.</li> <li>• Adanya mutasi pegawai di OPD yang belum pernah menangani aksi HAM atau RANHAM.</li> </ul> </li> <li>7. Data dukung administrasi (selain format pelaporan) yang cukup banyak sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menyiapkan atau melaporkan data dukung.</li> <li>8. Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Daerah.</li> <li>9. Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota Peduli HAM.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan.</li> <li>• Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi.</li> <li>• Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan RANHAM di Daerah.</li> <li>• Adanya mutasi pegawai di OPD yang belum pernah menangani aksi HAM atau RANHAM.</li> <li>• Data dukung administrasi (selain format pelaporan) yang cukup banyak sehingga</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rapat Evaluasi dan persiapan data Kab/Kota Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan Wonosari Rabu, 24 Maret 2021</li> <li>4. Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Selasa, 06 April 2021</li> <li>5. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Kamis, 15 April 2021</li> <li>6. Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan program Pemajuan HAM dan Penegakan HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil peserta 15 orang Rabu, 3 Februari 2021</li> <li>7. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Senin, 22 Februari 2021</li> <li>8. Rapat Evaluasi dan persiapan data Kab/Kota Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan Wonosari Rabu, 24 Maret 2021</li> <li>9. Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Selasa, 06 April 2021</li> <li>10. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Kamis, 15 April 2021</li> <li>11. Diseminasi Hak Asasi Manusia Penguatan Unit Pelaksanaan Teknis dalam mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Wisma Tamu Dalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Rabu, 16 Juni 2021</li> <li>12. Rapat Telaahan Rancangan Produk Hukum Daerah dari Berspektif HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Wisma Tamu Dalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Kamis, 24 Juni 2021</li> <li>13. Rapat Koordinasi persiapan Penilaian KKP HAM Rumah Makan Bu Baha Jl. Garuda,</li> </ol>	<p>mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM</li> <li>4. Kegiatan analisis kebijakan dan reporting pemanfaatan SIPKUMHAM dilakukan tiap triwulan oleh Tim Kajian Sipkumham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.</li> </ol>
--	--	---	---





	<p>perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menyiapkan atau melaporkan data dukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Daerah.</li> <li>• Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota Peduli HAM.</li> <li>• Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan.</li> <li>• Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi.</li> <li>• Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas ke Jakarta.</li> <li>• Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan.</li> <li>• Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi.</li> </ul>	<p>Plumbon, Banguntapan Bantul Yogyakarta Senin, 23 Agustus 2021</p> <p>14. Rapat Diseminasi Hak Asasi Manusia dalam Analisis Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan kreteria Penilaian KKP HAM Wisma Tamu Dhalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Rabu, 14 September 2021</p> <p>15. Rapat terkait dengan pelaksanaan hari HAM Sedunia Ditjen HAM Senin s.d Rabu, 6-8 Desember 2021</p>
--	---	--





### 3. DIVISI PEMASYARAKATAN

#### Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

Tabel 1.15 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pemasyarakatan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala masih kurangnya tempat dan sarpras yg harus dioerbaiki dan ditambah guna menunjang kegiatan tersebut</li> <li>2. Kapasitas SDM masih kekurangan, terutama dalam pengoperasian IT;</li> <li>3. Absensi pembinaan belum optimal</li> <li>4. Terbatasnya tempat pembinaan Pendataan dari wali belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan stakeholder dalam meningkatkanketrampilan narapidana;</li> <li>2. Terlaksananya pemindahan narapidana keluar wilayah D.I. Yogyakarta;</li> <li>3. Terlaksanya kegiatan assessment dan penempatan narapidana dari Lapas umum/khusus ke lapas medium;</li> <li>4. Terlaksananya pemberian remisi antara lain remisi umum, remisi khusus hari raya, remisi anak;</li> <li>5. Terlaksananya tindak lanjut pemberian ijin atas permintaan Riset dan kunjungan Ke Lapas dan Rutan;</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan sidang TPP;</li> <li>7. Terlaksananya kegiatan SDP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pelatihan narapidana bersertifikat pada tahun 2022 ini mencapai 530 narapida yang telah melaksanakan pelatihan dan memperoleh sertifikat. Pada pelaksanaannya disamping menggunakan anggaran yang ada dalam DIPA masing-masing UPT pelatihan narapidana tersebut juga melibatkan pihak ketiga, dengan biaya pelatihan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut seperti di Lapas Kelas IIA Yogyakarta melibatkan Rumah BUMN Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman menggandeng PT. Pertamina Lubricants guna melakukan pelatihan tersebut. Dengan rincian sebagai berikut               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 169 orang</li> <li>b. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 120 orang</li> <li>c. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebanyak 70 orang</li> <li>d. Lapas Kelas IIB Sleman sebanyak 92 orang</li> <li>e. Lapas Kelas IIB Wonosari sebanyak 79 orang</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan pelatihan kemandirian telah terlaksana dengan sangat baik dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari terbukti dengan capaian pemenuhan Target Penyeroran PNPB kegiatan kerja pada Lapas dan Rutan dilindungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dari target Rp. 26.905.000,- sudah terpenuhi sebesar Rp. 31.314.100,- (116,39%) dengan catatan seluruh Lapas dan Rutan</li> </ol>





			<p>telah mencapai lebih dari 100% dari target utama.</p> <p>3. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dilaporkan hasil penilaian SPPN yang telah dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh UPT Pemasarakatan yang berada di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta semuanya telah menggunakan instrument SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana);</li> <li>2) Seluruh narapidana telah mendapatkan haknya berdasarkan dari hasil penilaian pembinaan dan tidak mendiskriminasikan hasil pembinaan;</li> <li>3) Hasil rekapitulasi penilaian pembinaan narapidana di Lapas dan Rutan pada Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta.</li> <li>4) Melaporkan daftar hambatan, tantangan serta program inovatif dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta.</li> </ol>
<b>Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya kesamaan persepsi tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</li> <li>2. Belum adanya dasar Hukum dalam bentuk undang-undang terkait mekanisme RJ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PK melakukan pengawasan melalui daring sesuai dengan kontak telepon di surat jaminan dan melakukan pengawasan dengan kunjungan ke rumah klien/penjamin;</li> <li>2. PK melakukan wawancara melalui daring secara mendalam dan mempelajari data tambahan dari Wali Pas terkait perkembangan klien selama menjalani pembinaan di lapas/rutan (Riwayat Perkembangan Klien, dsb) agar mendapat informasi tambahan yang diperlukan walaupun tidak dapat bertatap muka;</li> <li>3. Telah melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian berupa pelatihan;</li> <li>4. Terlaksananya PB, CB, CMB</li> <li>5. Bekerjasama dengan Pokmas untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi pada Bapas Se – D.I. Yogyakarta untuk mengetahui Progress Pelaksanaan Keadilan Restorative Dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan Bagi Pelaku Dewasa Pada Bulan Desember 2022</li> <li>1) Bapas Kelas I Yogyakarta             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harus ada kesamaan persepsi tentang RJ diantara semua Lembaga Hukum, agar tidak terjadi permasalahan di lapangan;</li> <li>b. Perlu dipikirkan menyusun UU tentang RJ yang disepakati oleh semua Lembaga Hukum - Koordinasi dan Komunikasi efektif antar Lembaga Hukum;</li> </ol> </li> </ol>





		<p>melakukan test urin;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bekerjasama dengan PKBM sesuai dengan domisili klien anak;</li> <li>7. Bekerjasama dengan POKMAS untuk mengoptimalkan pembimbingan klien anak;</li> <li>8. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat Penegak Hukum (APH) secara berkesinambungan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak, kewajiban status klien anak/ABH;</li> <li>9. Bekerjasama dengan pokmas dan mencari sumber lain;</li> <li>10. Pembimbing Kemasyarakatan mensupport klien untuk mengikuti pembimbingan kemandirian yang diselenggarakan oleh Bapas;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Perlu Sosialisasi dan Pelatihan Terpadu tentang RJ Pelaksanaan diversi sudah berjalan sesuai undang-undang SPPA;</li> <li>d. Pelaksanaan RJ bagi pelaku dewasa di wilayah D.I. Yogyakarta masih NIHIL;</li> <li>e. APH belum menyetujui tanda tangan MoU karena belum ada Dasar Hukum;</li> <li>f. Hasil monitoring dari Ditjenpas Ke APH di Yogyakarta dan Bapas Yogyakarta akan di kaji dan evaluasi oleh Ditjenpas untuk melaksanakan RJ di Yogyakarta;</li> </ol> <p>2) Bapas Kelas II Wonosari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana dewasa sebagaimana yg digagas oleh direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Center For Detention Studies (CDS) dan The Asia Foundation (TAF), disambut baik oleh aparat penegak hukum di wilayah Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Namun karena belum ada dasar hukum yg kuat sebagaimana Sistem Peradilan Pidana Anak (UURI No. 11 Tahun 2012) sehingga sampai saat ini masih belum dapat diimplementasikan secara kongkrit, Meskipun di tiap – tiap APH sudah memiliki aturan tersendiri terkait keadilan restoratif, sebagaimana Kepolisian dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/II/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Mahkamah Agung dengan Keputusan Direktur</li> </ol>
--	--	--	--





			<p>Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice), karena aturan di tiap APH memiliki standar dan motivasi tersendiri;</p> <p>b. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka ketua Pengadilan Negeri Wonosari, dalam pertemuan tersebut, bersedia untuk menginisiasi dan menjembatani pertemuan antar APH untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta teknis pelaksanaan keadilan restoratif, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antar APH, jika tata cara dan mekanismenya tidak diatur sedemikian rupa berdasarkan konsensus bersama;</p> <p>c. Untuk Penghentian perkara tindak pidana pelaku dewasa di tingkat pengadilan dengan alasan keadilan restoratif, sampai saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun jika nantinya keadilan restoratif dapat dilaksanakan, maka sebaiknya dilakukan sebagaimana proses diversifikasi yaitu dengan penetapan hakim; dan</p> <p>d. Untuk saat ini, implementasi keadilan restoratif di tingkat pengadilan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum bisa dilakukan karena tidak ada kaitannya dengan pengadilan serta belum ada dasar hukum terutama mekanismenya, kecuali Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati tersebut hanya sekedar pendorong dan sosialisasi keadilan restoratif (bukan mengatur mekanisme pelaksanaan).</p>
--	--	--	--





<b>Subbidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi lain jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung belum maksimal dalam pemutakhiran data penahanan;</li> <li>2. Bapas &amp; LPKA belum dapat memanfaatkan SPPT TI karena fitur dalam proses pengembangan.</li> <li>3. Jumlah SDM yang terlatih lebih sedikit dibanding dengan jumlah peserta rehabilitasi;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan program rehabilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya jumlah overstaying melalui penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder;</li> <li>2. Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkotika memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan tes urin baik pada warga binaan maupun pegawai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi terkait SOP, Mekanisme dan prosedur pelaksanaan SPPT-TI kepada Lapas/Rutan/Bapas dan LPKA;</li> <li>2. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan data SPPT-TI pada Lapas/Rutan/Bapas dan LPKA;</li> <li>3. Bintorwasdal di UPT Pemasyarakatan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring di Lapas Kelas IIB Sleman tanggal 8 Desember 2022.</li> </ul> </li> <li>I. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta             <p>Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di Lapas narkotika Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dimulai pada tanggal 7 Februari 2022 dan berakhir pada tanggal 1 September 2022.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Skrining dan tes urine : Tanggal 13 - 14 Desember 2021</li> <li>2) Asesmen Awal : Tanggal 25 – 27 Januari 2022</li> <li>3) Case conference 1 tanggal 1 April 2022 dan case conference 2 tanggal 6 September 2022</li> <li>4) Asesmen Akhir Pelaksanaan tanggal 29- 30 Agustus 2022 dan tanggal 2 September 2022</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Sosial :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konseling Individu</li> <li>b. Konseling Kelompok</li> <li>c. Terapi Kelompok Statik Group</li> <li>d. Psiko edukasi</li> <li>e. Seminar</li> <li>f. Kegiatan Keagamaan</li> <li>g. Olah Raga</li> <li>h. FSG (Family Support Group)</li> </ol> </li> <li>• Rehabilitasi Medis :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konseling Individu</li> <li>b. Konseling Kelompok</li> <li>c. Terapi Simptomatik</li> <li>d. Psiko edukasi</li> <li>e. Kegiatan Keagamaan</li> <li>f. Olah Raga</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>II. Bapas Kelas I Yogyakarta</li> </ol>
--	---	---	--





			<p>Pelaksanaan program pasca rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Yogyakarta dilaksanakan pada Bulan Januari dan Mei dengan peserta 10 orang Klien.</p>
<b>Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian UPT Lapas/LPKA/Rutan tidak mengupdate data SDP Keamanan;</li> <li>2. Operator SDP Fitur Keamanan belum terlalu mengerti terkait pengisian dan masih belum lengkap dalam pengisian laporan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalin kerja sama dengan instansi lain seperti TNI, POLRI, Kejaksaan perihal kegiatan keamanan di Lapas/Rutan;</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan pengeledahan dan pemeriksaan di Lapas dan Rutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Basan dan Baran Tahun 2022 di Rupbasan</li> <li>2. kegiatan monitoring implementasi manajemen Mitigasi Bencana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasayarakatan Tahun 2022</li> <li>3. Pelaksanaan dan pengawasan tingkat kerawanan gangguan kamtib pada pelaksanaan intelijen Tahun 2022 di Wilayah D.I. Yogyakarta.</li> <li>4. Divisi Pemasayarakatan terjadwal melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sidak yang tidak terjadwal di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasayarakatan untuk memeriksa kegiatan yang dilaksanakan juga memeriksa laporan yang telah dikerjakan oleh UPT</li> <li>5. Melaksanakan Redistribusi Narapidana Overcrowding Di Lapas/Rutan/Lpka Tahun 2022 Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta</li> </ol>





#### 4. DIVISI KEIMIGRASIAN

#### Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022

Tabel 1.16 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Keimigrasian

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Sub Bidang Perizinan Keimigrasian	1. Varian Baru Covid 2. Sistem Simkim yang terkadang error	1. Terlaksananya Pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi (HBI) 2. Terlaksananya Pelayanan Eazy Paspor dalam rangkapingkatan PNPB; 3. Monitoring pada UPT Imigrasi dan Eazy Papor	1. Terlaksananya Monitoring Sub Bidang Perizinan pada seluruh Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah D.I. Yogyakarta 2. Terlaksananya Monitoring Layanan Eazy Paspor dilingkungan Kanwil Wilayah D.I. Yogyakarta
Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Sistem Jaringan yang sering error	1. Pengadaan penambah daya tahantubuh; 2. Terlaksananya Monev kepada UPT Imigrasi; 3. Terlaksananya Monev Layanan Eazy Paspor; 4. Terlaksananya Penilaian JFT Keimigrasian.	1. Terlaksananya Monitoring Layanan Eazy Paspor di lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta 2. Terlaksananya Monitoring Sub Bidang Informasi Keimigrasian
Subbidang Inteligen Keimigrasian	Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing	Terlaksananya pengawasan keimigrasian	1. Terlaksananya Rakor TIMPORA 2. Terlaksananya Pengawasan Cek Lapangan terhadap Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) 3. Terlaksananya Monitoring pada Satuan Kerja Keimigrasian di Wilayah D.I. Yogyakarta
Sub Bidang Penindakan Keimigrasian	Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing	Terlaksananya Rakor TIMPORA	1. Terlaksananya Rakor TIMPORA 2. Terlaksananya Monitoring Pada Satuan Kerja Keimigrasian di Wilayah D.I. Yogyakarta 3. Terlaksananya Pembinaan pada pegawai di lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta





Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR** Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022.

**IKHTISAR EKSEKUTIF** Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.





### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk factor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

### **Lampiran**

#### **1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

#### **2. Lain-lain yang dianggap perlu**





## BAB II

### *Perencanaan Kinerja*



**Informasi tentang Perencanaan Kinerja**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta  
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Tahun 2020-2024**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategi

##### 1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:  
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## **2. MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu





pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

### **3. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsadan bernegara;
2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan





Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. terlindunginya hak asasi manusia;
5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumensesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 4. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan





melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

## **5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 masih melanjutkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yakni:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.





## I. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat digambarkan sebagai berikut :

### Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.1 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Implementasi SPIP belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonominasional	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi





6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diluar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilanluar negeri	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatifadministratif	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas danfungsi
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturanperundang-undangan	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10.Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

### Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.2 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih denganKementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadapkelompok rentan	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	





## Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.3 Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
✓ Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	✓ Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
✓ Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	✓ Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
✓ Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	✓ Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparat melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	✓ Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

## Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Tabel 2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
✓ Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	✓ Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	✓ Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum,





	dan keamanan.
✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TIserta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	





Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2022 yaitu :

**Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022**

**Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
21	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah





## II. Program dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta mengalokasikan anggaran padatahun 2022 dan 2032 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

### Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.6 Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1)	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>21.948.287.000</b>	<b>22.512.624.000</b>
1	Kantor Wilayah (Setjen)	17/11/2021 013.01.2.409181/2022	21.687.394.000	22.295.771.000
2	Kantor Wilayah (Litbang)	17/11/2021 013.11.2.409188/2022	260.893.000	216.853.000
2)	<b>Program Pembentukan Regulasi</b>		<b>446.957.000</b>	<b>421.094.000</b>
1	Kantor Wilayah (PP)	17/11/2021 013.08.2.409185/2022	290.000.000	290.000.000
2	Kantor Wilayah (BPHN)	17/11/2021 013.10.2.409187/2022	156.957.000	131.094.000
3)	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		<b>8.739.580.000</b>	<b>7.486.186.000</b>
1	Kantor Wilayah (AHU)	17/11/2021 013.03.2.409180/2022	2.113.000.000	2.113.000.000
2	Kantor Wilayah (Pas)	17/11/2021 013.05.2.409182/2022	1.241.726.000	1.008.050.000
3	Kantor Wilayah (Imigrasi)	17/11/2021 013.06.2.409183/2022	1.335.009.000	1.335.009.000
4	Kantor Wilayah (KI)	17/11/2021 013.07.2.409184/2022	1.367.171.000	1.367.171.000
5	Kantor Wilayah (BPHN)	17/11/2021 013.10.2.409187/2022	2.682.674.000	1.662.956.000
4)	<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>		<b>229.395.000</b>	<b>229.395.000</b>
1	Kantor Wilayah (HAM)	17/11/2021 013.09.2.409186/2022	229.395.000	229.395.000
<b>TOTAL</b>			<b>31,364,219,000</b>	<b>30,599,299,000</b>





### **III. Indikator Kinerja Sasaran**

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### **1) Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni: Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.





Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## 2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:







- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta yang dibuat pada awal tahun 2022. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlihat pada formulir (terlampir).





## Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan
6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%





8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%





1 4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
1 5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
1 6	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
		Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
1 7	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%





1 8	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
1 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
2 0	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
2 1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12





### BAB III

## *Akuntabilitas Kinerja*



**Informasi tentang Perhitungan dan Penjelasan Terkait Capaian Kinerja  
Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dalam Mendukung Tercapainya  
Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Daerah Istimewa Yogyakarta**





### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. *Input* : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. *Output* : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. *Outcome* : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).





Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja *outcome*. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakandua rumus, yaitu :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

## **I. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif





dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja.

Pada tahun 2022 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2022 sebesar Rp 30.548.923.224 dimana target tahun 2022 adalah sebesar Rp 30.599.299.000. Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022.

$$\text{Capaian penyerapan anggaran : } \left( \frac{RP\ 30.548.923.224}{RP\ 30.599.299.000} \right) \times 100\% = 99,84\%$$

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Administrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum; dan





- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.





### Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1 Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

<b>Faktor Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dalam pengelolaan kepegawaian;</li> <li>b. Perbedaan Jenis Pelayanan dibidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM;</li> <li>c. Tugas pokok dan fungsi Divisi Adminsitasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum</li> <li>d. Pelatihan (diklat) dalam peningkatan kompetensi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya koordinasi pengelola kepegawaian;</li> <li>b. Belum optimalnya pelayanan, baik dibidang Administrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum;</li> <li>c. Pelaksanaan kinerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>d. Minimnya Pelatihan (diklat) bagi SDM.</li> </ul>
<b>PELUANG (<i>Oportunity</i>)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tuntutan publik terhadap sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian;</li> <li>b. Tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan tidak ada pungli;</li> <li>c. Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</li> <li>d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</li> <li>c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</li> <li>d. Melaksanakan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</li> <li>b. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</li> <li>c. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</li> <li>d. Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</li> </ul>
<b>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait Hukuman Disiplin Pegawai;</li> <li>b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik;</li> <li>c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran;</li> <li>d. Rendahnya kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait Hukuman Disiplin Pegawai;</li> <li>b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik;</li> <li>c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran;</li> <li>d. Rendahnya kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait Hukuman Disiplin Pegawai;</li> <li>b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik;</li> <li>c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran;</li> <li>d. Rendahnya kualitas SDM.</li> </ul>





## **II. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA**

- 1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
- 2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, seperti komputer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
- 3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer / laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai;
- 4) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan meja kursi (meja kubikel) yang seragam agar bisa maksimal dalam tata ruang kerja dikarenakan banyaknya jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.





## 1. Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2022

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,89 Indeks	125%

Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2021 yaitu:

**Tabel 3.3 Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	82,0	89,19	109%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	88,0	80,15	91%

**Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,89 Indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,89}{3,1}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah





mendapatkan nilai 3.89. Nilai tersebut didapat dari survey balitbang atas layanan internal Kantor Wilayah dengan responden seluruh pegawai Kantor Wilayah dan survey ini dilakukan setiap bulan. Dengan demikian, capaian kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

**Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah**

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,1 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





## 2. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perbandingan capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2021 dan 2022:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2020 dan 2021

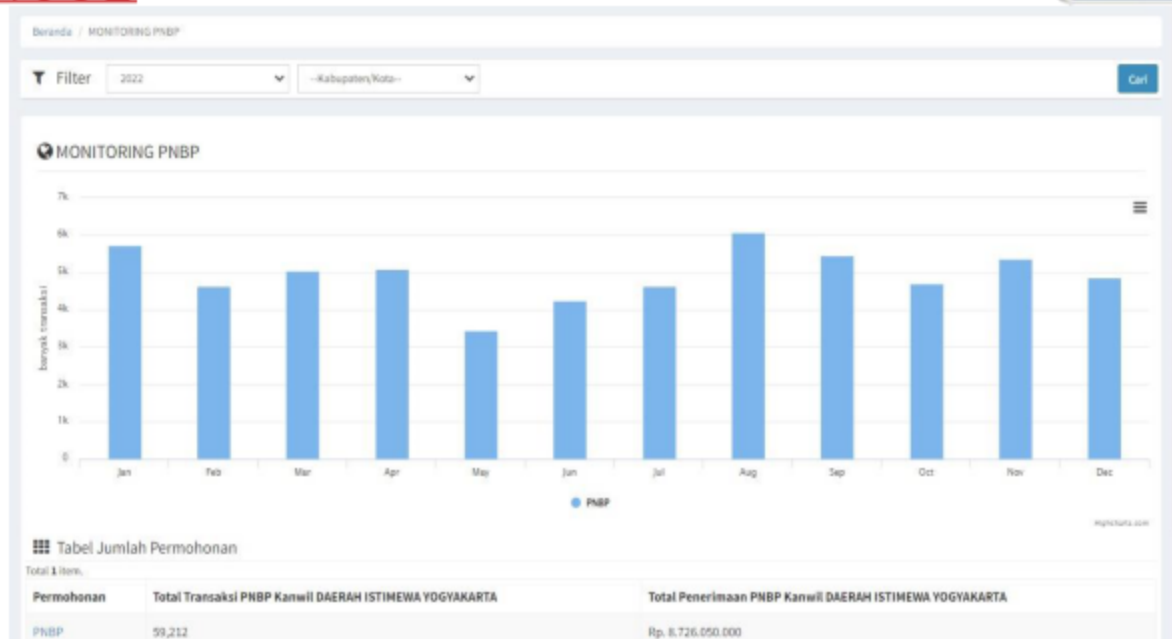
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	26,3%	526%	5%	16,12%	322%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	100%	121,9%	82%	90,69%	111%

### 1) Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

#### a) Persentase Peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah

"Jumlah penerimaan PNBPN Administrasi Hukum Umum Tahun 2021 sebesar Rp 7.514.450.000,- realisasi Tahun 2022 Rp 8.726.050.000,- mengalami kenaikan Rp 1.211.600.000 atau 16,12%"





Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan wilayah di D.I. Yogyakarta :




**Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNBP 2021 dikurang jumlah PNBP 2020 dibagi jumlah PNBP 2020 dikali 100% $\left( \frac{8.726.050.000 - 7.514.450.000}{7.514.450.000} \right) \times 100\% = 16,12\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{16,12\%}{5\%} \right) \times 100\% = 322\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 sebesar 8.726.050.000 dan tahun 2021 sebesar 7.514.450.000, peningkatan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum dikarenakan banyak notaris yang cuti karena selama pandemi tidak cuti, dan Pendaftaran Perseroan Perorangan. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di D.I. Yogyakarta sebesar 16,12%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, maka capaian kinerja peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2022 sebesar 322%.

**Tabel 3.8 Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





## 2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

### a) Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan wilayah di D.I. Yogyakarta :

#### i. Jumlah pengaduan MPD berdasarkan wilayah

**Tabel 3.9 Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta Tahun 2022**

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	06 Januari 2022	Suhartini	Notaris Esti Anna Widarsih	Pengaduan	Selesai (Sudah Masuk Ke Majelis Pengawas Wilayah)
2	22 Agustus 2022	Endang Triastianti	Notaris Yohanes Sardi Priyanto	Kode Etik	Tahap Klarifikasi Pemanggilan Pertama
3	29 September 2022	Emmy Kusumastuti Hadi	M.F Jenny Setia Yosgiarto	Pengaduan	Tahap Klarifikasi ke Terlapor
4	11 November 2022	Atik Utami SH	Notaris Derita Kurniawati S.H	Pengaduan	Tahap Klarifikasi ke Terlapor

**Tabel 3.10 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman Tahun 2022**

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	12 Desember 2022	1. Agustina Frisca Refinasari 2. Dany Riyanto	Margaretha Gunarti Widyastuti	Pengaduan	Baru proses gelar perkara




**Tabel 3.11 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul Tahun 2022**

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	-Surat : 13 Desember 2021 -Pemeriksaan : 7 Januari 2022	Prastiwi Yuni Pamungkas	1. Notaris Tri Wahyuni, S.H. 2. Notaris Sukanto, S.H.	Pengaduan	SELESAI (Ke MPW)
2	-Surat : 20 Desember 2021 -Pemeriksaan : 14 Januari 2022	Kris Triprasetya, S.Pd.	1. Notaris Rosevia Herlijanta, S.H. 2. Notaris A.J. Sigit Prasetyo, S.H.	Pengaduan	SELESAI (Ke MPW)
3	-Surat : 21 Juli 2022 -Pemeriksaan : 26 Agustus 2022	dr. Rianda Sulistyaningrum	Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum	Pengaduan	SELESAI (Ke MPW)
4	-Surat : 4 Agustus 2022 -Pemeriksaan : 8 September 2022	Muhammad Fatkul Huda, S.H.	Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum	Pengaduan	SELESAI (Ke MPW)
5	-Surat : 1 Oktober 2022 -Pemeriksaan : 16 November 2022	Benny Yulianingsih, S.H., M.H.	Notaris Nunuk Sulistyaningsih, S.H.	Pengaduan	SELESAI (Ke MPW)

**Tabel 3.12 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul Tahun 2022**

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	NIHIL				

**Tabel 3.13 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonprogo Tahun 2022**

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	5 Juli 2022	Ny. Mustanti	Notaris Nur Rahmawati	pengaduan	selesai




**Tabel 3.14 Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2021**

No	Bulan	Permohonan Panggilan	Persetujuan	Menolak	Bukan Kewenangan
1	Januari	3 Notaris	1 Notaris	1 Notaris	1 Notaris
2	Februari	2 Notaris	-	2 Notaris	-
3	Maret	3 Notaris	2 Notaris	1 Notaris	-
4	April	4 Notaris	2 Notaris	2 Notaris	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	2 Notaris	1 Notaris	-	1 Notaris
7	Juli	3 Notaris	3 Notaris	-	-
8	Agustus	4 Notaris	1 Notaris	3 Notaris	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	8 Notaris	2 Notaris	6 Notaris	-
12	Desember	2 Notaris	1 Notaris	1 Notaris	-
<b>Jumlah</b>		<b>31 Notaris</b>	<b>13 Notaris</b>	<b>16 Notaris</b>	<b>2 Notaris</b>

**Tabel 3.15 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Jenis Pelayanan	Pengaduan	Diproses	Belum Diproses
1	Penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta.	42	40	2
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>40</b>	<b>2</b>



**Tabel 3.16 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% $\left(\frac{40}{42}\right) \times 100\% = 90,69\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{90,69\%}{82\%}\right) \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 42 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2022, terdapat 40 pengaduan yang telah diselesaikan sehingga persentase realiasi kinerja sebesar 90,69%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82%, maka capaian kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 111%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

**Tabel 3.17 Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	82%	84%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





### 3. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2021 dan 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	80%	92,31%	115,38%	81%	104%	145%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	76,35%	105,53%	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	100%	130%	80%	111%	139%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	111%	139%	80%	111%	139%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	99,86%	166,67%	65%	97%	150%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	100%	103,09%	98%	98%	106%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	156%	195%	80%	156%	195%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	100%	133,33%	80%	-	-
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	98,94%	761,09%	15%	100%	100%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	39,12%	156,82%	28%	41%	144%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	80,82%	200,7%	67%	153%	229%
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	-	-	-	30 orang	-	-
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	100%	166,67%	70%	100%	144%





		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	40%	97,55%	243,86%	60%	93%	156%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	80,82%	200,7%	50%	81%	161%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	80%	120%	60%	72%	120%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	40,48%	161,90%	30%	71%	236%
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	89,74%	128,20%	75%	100%	133%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	214%	214%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70%	89,74%	128,21%	80%	100%	125%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	100%	130%	80%	100%	125%
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	-	-	-	80%	100%	125%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	-	-	-	70%	100%	143%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	-	-	-	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	-	-	70%	100%	143%
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	100%	133,33%	80%	100%	125%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	100%	166,67%	70%	100%	143%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	105%	125%	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	100%	166,67%	70%	100%	143%





9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	140,85%	-	-	-
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	108,70%	-	-	-
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	105,26%	-	-	-
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	166,67%	-	-	-
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	97,99%	130,66%	-	-	-
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133,33%	-	-	-
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS 9ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	76,87%	128,12%	-	-	-
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	69,14%	300,59%	-	-	-
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	1	1	100%	-	-	-

### 1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah

Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,





PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengisyaratkan akan pentingnya pelayanan yang maksimal dari berbagai aspek kepada masyarakat. Secara umum Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik agar masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta terus berbenah untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik, di antaranya menyediakan media informasi dan pengaduan yang representatif agar masyarakat memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan (pengaduan) terhadap pelayanan dan sikap/tingkah laku aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah:

- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- Kejelasan pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan





penyelesaian pelayanan Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

- Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramahserta saling menghargai dan menghormati;
- Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dilakukan survei terhadap masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang telah diterima. Awal tahun 2016, Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI telah membuat sarana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sebuah aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis web. Aplikasi ini dapat digunakan mulai dari tingkat Eselon I sampai kepada tingkat Unit Pelaksana Teknis.





Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik di masa yang akan datang maka Kementerian Hukum dan HAM RI mengimplementasikan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang diolah oleh Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut:

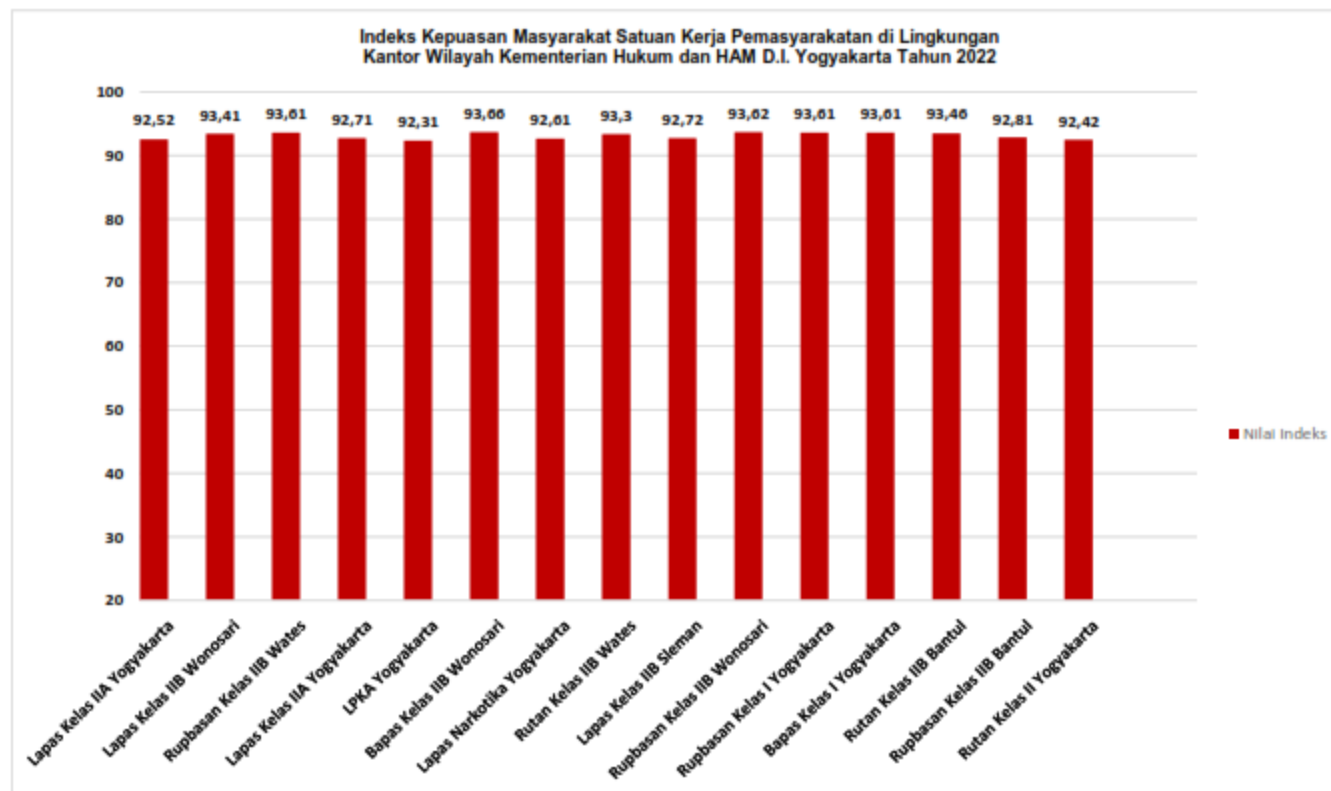
**Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja  
Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022:**

**93,14**





Grafik 3.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.  
Yogyakarta Tahun 2022





**Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	81%	104%  Rata-rata Nilai Indeks seluruh satuan kerja Pemasarakatan berdasarkan rata-rata keseluruhan relaisasi Indikator Kinera Kegiatan (dirata-ratakan dalam setahun) dalam satuan persen	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{104\%}{81\%}\right) \times 100 = 145\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 satuan kerja Pemasarakatan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta memperoleh nilai dari rata-rata keseluruhan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 104%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 81%, maka nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta adalah 145%.

**Tabel 3.20 Perbandingan Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	81%	81%	81%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

## **2) Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar**

### **a) Persentase Menurunnya Persentase Tahanan yang Overstaying**

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 yaitu :




**Tabel 3.21 Penghuni dan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022**

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Overstaying	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	3	0	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	85	0	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	93	0	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	41	0	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	34	0	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	0	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	168	0	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	19	0	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	26	0	100%
<b>TOTAL</b>		<b>472</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.22 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	$100\% - \left( \frac{0}{472} \right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{100\%}{80\%} \right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang overstaying satuan kerja di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 125%.



**Tabel 3.23 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum****Tabel 3.24 Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta**

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	3	3
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	85	91
3	Lapas Kelas IIB Sleman	93	103
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	41	39
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	34	30
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	1
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	168	201
8	Rutan Kelas IIB Bantul	19	19
9	Rutan Kelas IIB Wates	26	37
TOTAL		472	524



**Tabel 3.25 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan dikali 100% $\left(\frac{524}{472}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 139\%$

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 472 Tahanan, sedangkan yang memperoleh penyuluhan hukum sebesar 524 Tahanan. Maka perhitungan persentase realisasi sebesar  $= (524/472) \times 100\% = 100\%$ , sehingga persentase capaian kinerja sebesar  $= (100/80) \times 100\% = 139\%$ . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 139%.

**Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**c) Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum****Tabel 3.27 Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum**

No	Satuan Kerja	Jumlah Pemohon	Jumlah Tahanan yang memperoleh Bantuan Hukum	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	3	3	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	85	91	107%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	93	103	111%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	41	39	95%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	34	30	88%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	1	33%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	168	201	120%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	19	19	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	26	37	142%
<b>TOTAL</b>		<b>472</b>	<b>524</b>	<b>111%</b>

**Tabel 3.28 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum dikali 100%  $\left(\frac{524}{472}\right) \times 100\% = 111\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{111\%}{80\%}\right) \times 100\% = 139\%$





Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 111%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum adalah 111%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 139%.

**Tabel 3.29 Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

### 3) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

#### a) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

**Tabel 3.30 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	435	435	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	335	335	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	192	192	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	110	110	100%





5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	110	106	96,36%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	10	10	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	119	94	78,99%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	53	53	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	42	42	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1406</b>	<b>1377</b>	<b>97%</b>

**Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%  $\left(\frac{1377}{1406}\right) \times 100\% = 97\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{97\%}{65\%}\right) \times 100\% = 150\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 97%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 65%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 150%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian telah sesuai dengan standar.





**Tabel 3.32 Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	65%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi**

**Tabel 3.33 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapat Remisi	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	594	586	99%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	564	737	131%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	258	230	89%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	167	195	117%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	134	172	128%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	46	32	70%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	104	97	93%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	90	91	101%
9	Rutan Kelas IIB Wates	167	58	35%
TOTAL		2124	2198	103%




**Tabel 3.34 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat remisi dikali 100%  $\left(\frac{2198}{2124}\right) \times 100\% = 98\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{98\%}{98\%}\right) \times 100\% = 106\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebesar 100% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 98%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 106%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.35 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	98%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





### c) Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Tabel 3.36 Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Narapidana yang Mendapatkan Integrasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	127	131	103%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	214	220	103%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	98	114	116%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	54	114	211%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	41	79	193%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	14	30	214%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	13	131	1008%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	50	115	230%
9	Rutan Kelas IIB Wates	28	63	225%
<b>TOTAL</b>		<b>639</b>	<b>997</b>	<b>156%</b>

Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Integrasi dibagi jumlah narapidana dikali 100%  $\left(\frac{997}{639}\right) \times 100\% = 156\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{156\%}{80\%}\right) \times 100\% = 195\%$





Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sebesar 156% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 80%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 195%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.38 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**d) persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan**

**Tabel 3.39 Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal	Narapidana yang Mendapatkan Pendidikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Lapas Kelas IIB Sleman	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL




**Tabel 3.40 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	-	Tidak terdapat MoU/PKS dan Dipa Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kanwil kemenkumham DIY

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tidak mendapatkan hak pendidikan. Adapun target kinerja yang ditetapkan adalah 80%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 0%. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah Tidak terdapat MoU/PKS dan Dipa Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta.

**Tabel 3.41 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**e) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin****Tabel 3.42 Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	Jumlah Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Lapas Kelas IIB Sleman	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL

**Tabel 3.43 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	Jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%  100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 100%. Di tahun 2022 UPT Pemasasyarakatan di D.I. Yogyakarta tidak terdapat Narapidana resiko tinggi. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 15%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah sesuai dengan standar.



**Tabel 3.44 Perbandingan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	15%	15%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, Lkjip, dan Perjanjian Kinerja.

**f) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

**Tabel 3.45 Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	427	169	40%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	440	120	27%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	201	92	46%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	111	79	71%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	129	70	54%
TOTAL		1308	530	41%



**Tabel 3.46 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100% $\left(\frac{530}{1308}\right) \times 100\% = 41\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{41\%}{28\%}\right) \times 100\% = 144\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 41%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 28%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 144%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.47 Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	28%	28%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.





### g) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

**Tabel 3.48 Narapidana yang Bekerja dan Produktif**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Mendapat Program Asimilasi	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	427	448	105%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	440	344	78%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	201	213	106%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	111	440	341%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	129	559	433%
<b>TOTAL</b>		<b>1308</b>	<b>2004</b>	<b>153%</b>

**Tabel 3.49 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Jumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dibagi jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dikali 100%  $\left(\frac{559}{129}\right) \times 100\% = 153\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{153\%}{67\%}\right) \times 100\% = 229\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 153%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 67%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 229%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.





**Tabel 3.50 Perbandingan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	67%	67%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **h) Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi**

**Tabel 3.51 Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi**

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Tinggi	Narapidana yang Mengikuti Pendidikan tinggi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Lapas Kelas IIB Sleman	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		NIHIL	NIHIL	NIHIL

**Tabel 3.52 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang	-	Tidak terdapat MoU/PKS dan DIPA Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kanwil kemenkumham DIY

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi tidak mendapatkan hak





pendidikan. Adapun target kinerja yang ditetapkan adalah 30 Orang. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 0%. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah Tidak terdapat MoU/PKS dan DIPA Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta.

**Tabel 3.53 Perbandingan Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 orang	30 orang	30 orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **4) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar**

##### **a) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya**

**Tabel 3.54 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)**

No	Satuan Kerja	Jumlah Basandan Baran	Jumlah BasanBaran yang Dipelihara	Persentase
1	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	28	28	100%
2	Rupbasan Kelas II Bantul	31	31	100%
3	Rupbasan Kelas II Wonosari	9	9	100%
4	Rupbasan Kelas II Wates	4	4	100%
TOTAL		72	72	100%




**Tabel 3.55 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) dibagi jumlah seluruh basan baran dikali 100%  $\left(\frac{72}{72}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 144\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 70%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) adalah 144%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

**Tabel 3.56 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





**b) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap**

**Tabel 3.57 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

No	Satuan Kerja	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap)	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi	Persentase
1	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	28	24	86%
2	Rupbasan Kelas II Bantul	31	21	68%
3	Rupbasan Kelas II Wonosari	9	4	44%
4	Rupbasan Kelas II Wates	4	18	450%
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>67</b>	<b>93%</b>

**Tabel 3.58 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Basan baran yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	60%	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang Inkrah dibagi jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dikali 100%  $\left(\frac{67}{72}\right) \times 100\% = 93\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{93\%}{60\%}\right) \times 100\% = 156\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase basan dan baran yang telah Inkrah dan telah dieksekusi di Satuan Kerja Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 93%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 60%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah 156%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan basan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan standar.





**Tabel 3.59 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	60%	60%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**5) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar**

**a) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga**

**Tabel 3.60 Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga**

No	Satuan Kerja	Jumlah Klien Usia Produktif	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	Persentase
1	Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	5191	3687	71%
2	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	3094	2983	96%
<b>TOTAL</b>		<b>8285</b>	<b>6670</b>	<b>81%</b>

**Tabel 3.61 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%  $\left(\frac{6670}{8285}\right) \times 100\% = 81\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{81\%}{50\%}\right) \times 161\%$





Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 81%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 50%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 161%. Dengan demikian, persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.62 Perbandingan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	50%	50%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **b) Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara**

Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar indikator kinerja yaitu Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara maka diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, terutama bagi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, serta kegiatan lain yang dapat mendukung dan menambah wawasan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan jumlah klien pemasyarakatan yang ditangani sehingga pembimbingan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai standar. Proses Peradilan Anak dilakukan setelah ada permintaan Litmas dari Kepolisian/Penyidik. Adapun setelah itu penyusunan litmas anak oleh Pembimbing Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Berikut tabel jumlah pendampingan anak selama 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :




**Tabel 3.63 Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara**

No	Satuan Kerja	Jumlah Pendampingan Anak	Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Persentase
1	Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	339	252	74%
2	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	60	35	58%
<b>TOTAL</b>		<b>399</b>	<b>287</b>	<b>72%</b>

**Tabel 3.64 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan pelayanannya bimbingan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjaradibagi jumlah pendampingan Anak dikali 100% $\left(\frac{287}{399}\right) \times 100\% = 72\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{72\%}{60\%}\right) \times 100\% = 120\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 72% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 60%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 120%. Dengan demikian, persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.65 Perbandingan Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	60%	60%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





### c) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Fokus utama UU SPPA adalah restorative justice yaitu hukuman diberikan bukan untuk membalaskan dendam, melainkan untuk mengembalikan anak tersebut menjadi baik. Salah satu implementasi dari upaya ini ialah dengan pemberian diversi, yaitu penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar ruang lingkup pidana. Anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA, salah satunya ialah hak untuk tetap memperoleh pendidikan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 tetap memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Pendidikan. Berikut data jumlah anak yang melanjutkan Pendidikan pada Balai Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :

**Tabel 3.66 Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya**

Satuan Kerja	Jumlah klien anak	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	303	215	71%

**Tabel 3.67 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan bimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100% $\left(\frac{215}{303}\right) \times 100\% = 71\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{71\%}{30\%}\right) \times 100\% = 236\%$





Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 71% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 236%. Dengan demikian, persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.68 Perbandingan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30%	30%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **6) Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar**

##### **a) Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat**

**Tabel 3.69 Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat**

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	23	23	100%





**Tabel 3.70 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah klien anak dikali 100% $\left(\frac{23}{23}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{75\%}\right) \times 100\% = 133\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 75%. Maka capaian kinerja persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 133%. Capaian tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.71 Perbandingan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	75%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

#### b) Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

**Tabel 3.72 Anak yang memperoleh hak integrasi**

Satuan Kerja	Jumlah verifikasi usulan Integrasi anak	Jumlah Anak yang memperoleh hak integrasi	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	14	30	214%





**Tabel 3.73 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan Reintegrasi Sosial dikali 100%  $\left(\frac{214}{100}\right) \times 100\% = 214\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{214\%}{100\%}\right) \times 100\% = 214\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak integrasi sebesar 214% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 100%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 214%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.74 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**c) Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar****Tabel 3.75 Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar**

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	23	23	100%

**Tabel 3.76 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{23}{23}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sebesar 100% dimana target realisasi padatahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.77 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**d) Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal****Tabel 3.78 anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal**

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	23	23	100%

**Tabel 3.79 Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{23}{23}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak mengikuti pendidikan formal dan non formal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.80 Perbandingan Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





## 7) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

### a) Persentase pengaduan yang diselesaikan

Tabel 3.81 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	1	1	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	0
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	1	1	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>




**Tabel 3.82 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.83 Perbandingan Persentase pengaduan yang diselesaikan**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

#### b) Persentase pencegahan gangguan kamtib

**Tabel 3.84 pencegahan gangguan kamtib**

No	Kegiatan	Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtib	Terlaksana	Persentase
1.	Sidak	14	14	100%





2.	Satopsatnal	20	20	100%
3.	Tes urine	15	15	100%
4.	Razia	16	16	100%
5.	Monev	47	47	100%
Total		112	112	100%

Tabel 3.85 Perhitungan Kinerja pencegahan gangguan kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	Jumlah pencegahan gangguan kamtib yang diselesaikan dibagi jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib dikali 100%  $\left(\frac{112}{112}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.86 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





**c) Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib**

**Tabel 3.87 kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib**

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	0	0	0
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	0
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.88 Perhitungan Kinerja kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	100% - Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib dikali 100%  $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$





Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

**Tabel 3.89 Perbandingan Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

**Tabel 3.90 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

No	Satuan Kerja	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Kamtib Secara Tuntas	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	0





6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	0
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.91 Perhitungan Kinerja Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Jumlah pemulihan kondisi keamanan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100% $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.92 Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





## 8) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

### a) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 3.93 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	1	1	100%
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	0	0	0
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	1	1	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

Tabel 3.94 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100%  $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$





Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.95 Perbandingan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **b) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

**Tabel 3.96 Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah**

No	Kegiatan	Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtib	Terlaksana	Persentase
1.	Sidak	14	14	100%
2.	Satopspatnal	20	20	100%
3.	Tes urine	15	15	100%
4.	Razia	16	16	100%
5.	Monev	47	47	100%
Total		112	112	100%




**Tabel 3.97 Perhitungan Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	Jumlah pencegahan gangguan kamtib yang diselesaikan dibagi jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib dikali 100%  $\left(\frac{112}{112}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.98 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**c) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib****Tabel 3.99 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib**

<b>No</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Jumlah Tahanan/Napi/AnakPelaku Gangguan Kamtib</b>	<b>Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulang Pelanggarannya</b>	<b>Persentase</b>
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	0	0	0
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	0
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>



**Tabel 3.100 Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan****Kamtib**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100% - Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib dikali 100% $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

**Tabel 3.101 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





#### d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.102 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No	Satuan Kerja	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Kamtib Secara Tuntas	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	0
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	0
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	0	0	0
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	0
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	0
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Tabel 3.103 Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Jumlah pemulihan kondisi keamanan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%  $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 143\%$





Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.104 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





#### 4. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.105 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,90	122%
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,97	127%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,94	126%

Perjanjian Kinerja dan capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021 yaitu:

**Tabel 3.106 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20	3,90	122%
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	3,12	3,94	127%





## **1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah**

### **a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut beberapa unsur layanan/variabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- Persyaratan :Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yangditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur :Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian :Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai denganyang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengantarif/biaya yang ditetapkan;
- Sarana prasarana : Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikankenyamanan/mudah digunakan;
- Respon :Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluanBapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.
- Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan 4 skala penilaian, yaitu:





Grade*	Keterangan	Indeks
A	Sangat Baik	3,600 – 4,000
B	Baik	3,065 – 3,599
C	Kurang Baik	2,600 – 3,064
D	Tidak Baik	1,000 – 2,599

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 :

**Tabel 3.107 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian**

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,90

**Tabel 3.108 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,90	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,90}{3,20}\right) \times 100\% = 122\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh nilai 3,90. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,20, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 122%. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



**Tabel 3.109 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,20	3,20

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Indeks Kepuasan Internal di Wilayah**

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melakukan survei integritas internal. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pegawai dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut 4 kategori pertanyaan dan penilaian integritas terhadap tata kelola organisasi, yaitu:

**i. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi (Indeks Sistem Anti Korupsi)**

- **Transparansi** : Pegawai menangani tugas-tugas/pekerjaan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
- **Menerima imbalan** : Pegawai melaksanakan tugasnya tanpa menerima pemberian (uang/hadiah/hiburan) dan kemudahan (fasilitas atau janji).
- **Perlakuan yang sama** : Pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan daerah asal(kesukuan), sekolah asal, kekerabatan,agama.
- **Prosedur** : Pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menawarkan/mengajak untuk membantu secara ilegal.





- Privasi pelapor : Pelapor kejadian korupsi dan pelapor terkait pelanggaran kepentingan publik /masyarakat dilindungi secara efektif.
- Proses pelanggaran : Pelapor kejadian korupsi dan pelapor terkait pelanggaran kepentingan publik/masyarakat dilindungi secara efektif.
- Pencegahan korupsi : Sistem pencegahan korupsi di internal di instansi telah berjalan secara efektif.

ii. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM ( Indeks SDM)

- Penerimaan pegawai : Proses penerimaan pegawai telah bersih dari KKN.
- Penempatan : Proses penempatan/redistribusi pegawai telah bersih dari KKN.
- Promosi jabatan : Proses promosi/kenaikan jabatan telah bersih dari KKN.
- Pengembangan kompetensi: Proses pemilihan/persetujuan pegawai yang ikut dalam program pengembangan kompetensi (diklat/beasiswa) telah bersih dari KKN.
- Kenaikan pangkat : Proses pengurusan kenaikan pangkat telah bebas dari KKN.
- Gaji : Proses pengurusan gaji berkala telah bebas dari KKN.
- Presensi pegawai : Proses pengelolaan absensi pegawai telah bebas dari manipulasi.

iii. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran (Indeks Anggaran)

- Perjalanan dinas : Pengelolaan anggaran pada pengeluaran perjalanan dinas dan biaya operasional telah bebas dari penyalahgunaan/penyimpangan.
- PBJ (Pengadaan Barang jasa): Pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah bebas dari penyalahgunaan/penyimpangan.
- Honorarium : Pengelolaan anggaran biaya penunjang pelaksanaan kegiatan (honorarium/lembur) telah bebas dari penyalahgunaan/penyimpangan





- Bukti transaksi : Terbebas praktik pemalsuan bukti transaksi.
- Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma (Indeks Aturan Dan Norma)
- Tanggung jawab : Atasan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- Pekerjaan tidak sesuai aturan: Atasan selalu menaati dan memberikan perintah kerja sesuai aturan.
- Hukuman pekerjaan tidak sesuai aturan: Atasan memberikan hukuman saat saya melakukan pekerjaan /tugas yang tidak sesuai dengan aturanyang berlaku.
- Kode etik : Atasan selalu mematuhi kode etik dan aturan disiplin organisasi.

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Internal dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022:

**Tabel 3.110 Indeks Kepuasan Internal**

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,97

**Tabel 3.111 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Internal**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,97	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,97}{3,12}\right) \times 100\% = 127\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh nilai 3,97. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,12, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 127%. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.




**Tabel 3.112 Perbandingan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,12	3,12

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKJIP, dan Perjanjian Kinerja.

### c) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

**Tabel 3.80 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022**

Lampiran II Surat Sekretaris Ditjen Imigrasi  
 Nomor : IM.1-PP.01.02-001  
 Tanggal : 3 Januari 2023

#### DAFTAR NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN WILAYAH DAN SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	Nilai IPK
		TOTAL	IPK
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM ACEH</b>	<b>67</b>	<b>3,77</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	9	3,77
408040	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	1	3,88
408073	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	14	3,68
409006	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	12	3,82
409032	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	6	3,69
627323	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	12	3,98
603533	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon	13	3,68
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM BALI</b>	<b>68</b>	<b>3,81</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI	9	3,78
408022	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3	3,62
409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	44	3,82
652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	7	3,77
654602	Rudarah Denpasar	5	4,00
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN</b>	<b>63</b>	<b>3,73</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	13	3,95
409036	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3	3,81
613624	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	34	3,71
652283	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	15	3,97
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU</b>	<b>71</b>	<b>3,72</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	10	3,79
409061	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	11	3,85
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA</b>	<b>43</b>	<b>3,94</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA	16	3,94
407995	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	27	3,94



**Tabel 3.113 Perhitungan Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,94	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,94}{3,12}\right) \times 100\% = 126\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3,94. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,12, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 126%. Dengan demikian, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.114 Perbandingan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,12	3,12

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





## 5. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.115 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan	9.747 Layanan	1545%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	11 Lokus	1100%
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	19 Lokus	950%
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100%

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 3.116 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	840 Layanan	8902 Layanan	1059,7%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 Persentase	100% Persentase	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	3 Laporan	300%





**1) Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

**a) Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah**

Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yaitu:

**Grafik 3.117 Pemohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta**





**Tabel 3.118 Perhitungan Kinerja Pemohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	631 Layanan	9747 Layanan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{9747}{840}\right) \times 100\% = 1545\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah mencapai 9.747 pemohon dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 840 layanan. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1545%. Dengan demikian, permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.119 Perbandingan Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan	631 Layanan	631 Layanan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah**

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI di Wilayah D.I. Yogyakarta sebanyak 11 lokus yakni:

**Tabel 3.120 Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta**

No	Nama Kegiatan Diseminasi dan Promosi
1	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema " <i>Mendorong Potensi Indikasi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta : Tantangan dan Rencana Aksi</i> " bertempat Hotel Westlake Resort tanggal 23 – 25 Februari 2022





2	Diseminasi Hak Cipta dengan tema; <i>"Pelindungan Hak Cipta Performing Art di Tengah Revolusi Digital"</i> bertempat Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 10 Maret 2022
3	Kegiatan Pameran dan <i>Talkshow</i> Hak Cipta di Bidang Seni Rupa dengan tema <i>"Intellectual Property and Youth Creativity"</i> bertempat Jogja City Mall tanggal 21 – 22 April 2022
4	Pemberian Layanan Kekayaan Intelektual di Pusat Perbelanjaan, dengan tema: <i>"Rumah Kekayaan Intelektual: Menghadirkan Rasa Aman dalam Berusaha dan Berinovasi"</i> bertempat Jogja City Mall tanggal 17 – 21 Mei 2022
5	Diseminasi Kekayaan Intelektual dengan tema "Membangun Kesadaran Usaha melalui Reputasi Merek" bertempat Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 25 Mei 2022
6	Kegiatan Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan tema <i>"Sertifikasi Pusat Perbelanjaan sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual"</i> bertempat Hotel Indoluxe Yogyakarta tanggal 21 Juni 2022
7	Mobile Intellectual Property Clinic / MIC (Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak) dengan tema Kekayaan Intelektual bagi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Negeri bertempat Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2022
8	Mobile Intellectual Property Clinic dengan tema "Pelindungan Desain Industri dalam Memacu Inovasi dan Kreatifitas Ekonomi Kreatif" bertempat Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2022
9	Mobile Intellectual Property Clinic dengan tema "Bimbingan Teknis Teknologi Informasi di Bidang Kekayaan Intelektual" bertempat Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2022
10	Kegiatan edukasi pencegahan dan pelanggaran kekayaan intelektual dengan tema; <i>"Urgensi Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi Sektor Properti"</i> bertempat Hotel Eastparc Yogyakarta tanggal 14 September 2022
11	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Mengajar 2022 bertempat The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center tanggal 28 September 2022

**Tabel 3.121 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Locus	11 Locus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{11}{1}\right) \times 100\% = 1100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai 11 locus dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 locus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1100%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.





**Tabel 3.122 Perbandingan Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

## 2) Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

### a) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

**Tabel 3.123 Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta**

No	Nama Kegiatan Diseminasi dan Promosi	Keterangan
1	Tindak pidana Kekayaan Intelektual atas Merek "nDalem"	Selesai
2	Dugaan tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual Hak Cipta Buku (e-book) "LovRinz"	Proses

**Tabel 3.124 Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	$\frac{100\%}{100\%} 100\% = 100\%$



**Tabel 3.125 Perbandingan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah**

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah terdapat 18 kegiatan dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:

**Tabel 3.126 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM D.I. Yogyakarta**

No	Lokasi	Tanggal
1	Westlake	13 Januari 2022
2	Polda D.I. Yogyakarta	4 Maret 2022
3	Ndalem Bangunjiwo	4 Maret 2022
4	Ndalem Wonosari	4 Maret 2022
5	Ndalem Banguntapan	4 Maret 2022
6	Hyatt	11 Januari 2022
7	Sleman City Hall	20 Juni 2022
8	Jogja City Mall	29 September 2022
9	Hartono Mall	9 September 2022





10	Mall Malioboro	29 Juli 2022
11	Plaza Ambarrukmo	29 Juli 2022
12	Atrium Resort	11 Januari 2022
13	Crystal Lotus	29 Agustus 2022
14	Artotel Suites Bianti	8 Maret 2022
15	Toko Emas Punokawan	8 Maret 2022
16	Hotel Dafam Signature	10 November 2022
17	Hotel Santika Gunung Kidul	8 November 2022
18	Sekretariat MPIG Jambu Dalhari	14 November 2022

**Tabel 3.127 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	18 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{2}{18}\right) \times 100\% = 900\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah mencapai 18 kegiatan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 kegiatan, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 900%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.



**Tabel 3.128 Perbandingan Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

### c) Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

**Tabel 3.129 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual**

Nama Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual	Keterangan
Tindak pidana Kekayaan Intelektual atas Merek “nDalem”	Selesai

**Tabel 3.130 Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 1 (satu) kali dimana target yang telah ditetapkan adalah 1 kegiatan dan menghasilkan 3 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.




**Tabel 3.131 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

## 6. CAPAIAN PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.132 Capaian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 dan 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	125%	80%	126,25%	158%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	28 Orang	112%	25 Orang	27 Orang	108%





## 1) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

### a) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

Jumlah Rancangan Perda yang disusun dan jumlah rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah, yaitu:

**Tabel 3.133 Judul Rancangan Perda Kantor Wilayah**

No	Judul Raperda
1	Raperda tentang Perlindungan Toko rakyat
2	Raperda tentang Reklame
3	Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan
4	Raperda tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah
5	Raperda tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
6	Raperda tentang Penyelenggaraan bangunan gedung
7	Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
8	Raperda tentang Badan Usaha Milik kalurahan
9	Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perumahan
10	Raperda tentang Penyertaan modal BUMD
11	Raperda tentang Kabupaten Layak Anak
12	Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13	Raperda tentang Pasar
14	Raperda tentang Penyelenggaraan bangunan Gedung
15	Raperda tentang Kerja sama Daerah
16	Raperda tentang Pembangunan kepemudaan
17	Raperda tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah
18	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





19	Raperda kab. Bantul tentang Perubahan atas Peraturan daerahkabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
20	Raperda Kab. Bantul tentang Kabupaten Layak Anak
21	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
22	Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengelolaan kebudayaan
23	Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri
24	Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan
25	Raperda Gunungkidul tentang Penyelenggaraan perpustakaan
26	Raperda Kulonprogo tentang Sistem Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Terpadu
27	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
28	Raperda Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
29	Raperda Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Daerah.
30	Raperda Kabupaten Kulonprogo tentang Rencana Pembangunan Industri Kulonprogo tahun 2022-2042
31	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
32	Raperda Kota Yogyakarta tentang Reklame
33	Raperda tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
34	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
35	Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren
36	Raperda kabupaten kulon progo tentang penyelenggaraan toleransi bermasyarakat (berkas dikembalikan)
37	Raperda tentang Rencana tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Perda dalam setahun.





Tabel 3.134 Perhitungan Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi dibagi jumlah target Raperda Ditjen PP dikali 100% $\left(\frac{37}{19}\right) \times 100\% = 195\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{195\%}{80\%}\right) \times 100\% = 243,75\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada tahun 2022 adalah sebesar 195%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 195%. Dengan demikian, persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.135 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





## 2) Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

### a) Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebanyak 27 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 16 orang Perancang Pertama dan 11 orang Perancang muda.

**Tabel 3.136 Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{27}{25}\right) \times 100\% = 108\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 27 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 108%.

**Tabel 3.137 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





## 7. CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.138 Capaian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	200%	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	200%
	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	0	(tidak ada penilaian KKP HAM Tahun 2021)	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	167%
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	11 Instansi Pemerintah	550%	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100%
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	8 Rekomendasi	112%	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	200%





## 1) Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

### a) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi <https://serambi.ksp.go.id> yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2022 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis.

Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 6 instansi yaitu:

**Tabel 3.139 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM**

No	Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota
1	Pemerintah Daerah DIY
2	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo



**Tabel 3.140 Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{6}{3}\right) \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 6 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta yang melaksanakan program Aksi HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 3 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

**Tabel 3.141 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Jumlah kab/kota peduli HAM**

Terdapat 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah secara aktif ikut serta mengirimkan data/ dokumen penilaian Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2022, dan terhadap semua data/ dokumen tersebut telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM diantaranya : 1. Penilaian terhadap hasil verifikasi; 2. Peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi; Hasil penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada masing-masing





Kabupaten/ Kota pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang; Advancing Human Rights for Everyone” sekaligus pemberian apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang meraih Predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya :

**Tabel 3.142 kab/kota peduli HAM**

No	Kabupaten/kota	Nilai	Kriteria
1	Kota Yogyakarta	94,8	Peduli HAM
2	Kabupaten Sleman	91,55	Peduli HAM
3	Kabupaten Bantul	88,3	Peduli HAM
4	Kabupaten Kulon Progo	90,45	Peduli HAM
5	Kabupaten Gunungkidul	84,6	Peduli HAM

**Tabel 3.143 Perhitungan Kinerja Jumlah kab/kota peduli HAM**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{5}{3}\right) \times 100\% = 167\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta Jumlah kab/kota peduli HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 3 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 167%.



**Tabel 3.144 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

**c) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM**

Capaian di Tahun 2022 ada 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2022, diantaranya :

**Tabel 3.145 Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM**

No	Satuan Kerja
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
3	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
4	Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates





6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
7	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
8	Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari
10	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari
11	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
12	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis ham kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.





Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan yaitu masih kurangnya fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.

**Tabel 3.146 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	12 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{12}{2}\right) \times 100\% = 600\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta yang mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 600%.

**Tabel 3.147 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.





## 2) Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

### a) Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengusulkan 3 (tiga) Rekomendasi rancangan produk hukum daerah “Rancangan Peraturan Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Adminisrasi Kependudukan” dari perspektif Hak Asasi Manusia, IPK dan IKM.

**Tabel 3.148 Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{6}{3}\right) \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 6 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

**Tabel 3.149 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



**8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI DAN PROGAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM****TA 2022**

Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.150 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	98,97%	122%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82,36%	103%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,62%	125%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	500%

Capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 3.151 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	15 Kegiatan	62 Kegiatan	413,3%





2	Terselenggaranya kesadaran hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	76,17%	98,92%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	75,37%	95,41%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	74,62%	97,40%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	68,60	98%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	500%

**1) Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah**

**a) Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah**

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah diantaranya yaitu :

1. Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum;
2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Fasilitasi penyusunan naskah akademik, Fasilitasi penyusunan Perencanaan legislasi daerah, Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan naskah akademik.

**Tabel 3.152 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{2}{2}\right) \times 100\% = 100\%$





Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

**Tabel 3.153 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

## **2) Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah**

### **a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari perhitungan SIDBankum dan Omspan;
- Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia





Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum dengan rincian 241 (dua ratus empat puluh satu) orang mendapatkan pendampingan pada tahap penyidikan/gugatan dan 194 (seratus Sembilan puluh empat) orang mendapatkan pendampingan pada tahap persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.154 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi**

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Penyidikan/Gugatan (Orang)	Persidangan (Orang)	Banding (Orang)	Kasasi (Orang)	Peninjauan Kembali (Orang)
1	YLKBH Handayani	9	22	0	0	0
2	YLBH APIK	11	8	0	0	0
3	LK3 Sekar Melati	9	8	0	0	0
4	YLBH SIKAP	19	11	0	0	0
5	RBH Yayasan AFTA	11	9	0	0	0
6	LBH Al Kautsar	22	14	0	0	0
7	LBH Sembada	11	9	0	0	0
8	YPBH Nyi Ageng Serang	0	14	0	0	0
9	LBH Harapan	11	9	0	0	0
10	LBH Senopati	10	15	0	0	0
11	YLPA D.I Yogyakarta	9	7	0	0	0
12	LKBH FH Universitas Islam Indonesia	9	7	0	0	0
13	LBH Dharma Yudha	9	7	0	0	0
14	PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan	11	8	0	0	0





15	LBH Sekawan	20	3	0	0	0
16	YLBHI LBH Yogyakarta	1	0	0	0	0
17	PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	9	8	0	0	0
18	LBH Tentrem	18	7	0	0	0
19	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	9	8	0	0	0
20	LKBH FH Universitas Janabadra	9	8	0	0	0
21	YPBH Peradi Bantul	12	6	0	0	0
23	PBHI Wilayah Yogyakarta	12	6	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>241</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 3.155 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dikali 100%  $\left(\frac{435}{435}\right) \times 100\% = 98,97\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{98,97\%}{81\%}\right) 100\% = 122\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 98,97%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 81%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 122%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang





dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.156 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	81%	81%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

**b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp.271.170.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.264.811.400 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) atau 97,66% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen) dari perhitungan SIDBankum. Terdapat perbedaan perhitungan serapan anggaran pada Omspan yaitu sebesar Rp.264.836.400 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 97,66%(sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen);
- Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi





Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.157 Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Negosiasi (Orang)	Mediasi (Orang)	Drafting Dokumen (Orang)	Pendampingan Di Luar Pengadilan (Orang)	Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Penelitian Hukum (Kegiatan)	Investigasi Perkara (Kegiatan)	Konsultasi Hukum (Orang)	Penyuluh Hukum (Kegiatan)
1	YLBH APIK					2				2
2	LK3 Sekar Melati					1				3
3	RBH Yayasan AFTA									6
4	LBH Sembada					2				2
5	YPBH Nyi Ageng Serang					1				2
6	LBH Harapan					2				2
7	LBH Senopati				1	1				5
8	YLPA D.I.Yogyakarta					1				2
9	LBH Dharma Yudha									3
10	LBH Sekawan		1			3				4
11	LBH Tentrem									9
12	YLBH Handayani			3		1				2
13	LBH Al-Kautsar			3		1				2
14	LKBH Fakultas Hukum Ull					1	1			1





15	PKBH Fakultas Hukum UAD								3
16	YLBHI LBH Yogyakarta								4
17	PKBH Fakultas Hukum UMY		1		1				2
18	LSBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga				1				2
19	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra								3
20	YPBH Peradi Bantul				1				2
21	PBHI Wilayah Yogyakarta				1				2
22	YLBH SIKAP								
JUMLAH		1	7	1	20	1			63
PENERIMA BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 93 ORANG PENERIMA					KEGIATAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 100 KEGIATAN				

Tabel 3.158 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi dikali 100%  $\left(\frac{82,36\%}{80\%}\right) \times 100\% = 82,36\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  103%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 82,36%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 80%, maka





capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 103%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diLingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.159 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

#### **c) Indeks kepuasan layanan bantuan hukum**

Agar terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2022 dengan baik dan optimal sesuai keluaran atau output yang diharapkan makapenyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di wilayah harus diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tugas Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

1. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
2. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
3. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran





dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian;

4. Panitia Pemantauan dan Evaluasi oleh Pengawas Daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi, di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan melalui wawancara dengan penerima bantuan hukum. Adapun data survey yang dilakukan oleh Panitia Pemantau mengenai Kepuasan Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum sebagai berikut :

**“Dari 47 responden di Lapas dan Rutan wilayah D.I. Yogyakarta, 42 responden menyatakan “Puas” (89,36%) dan 5 responden menyatakan “Tidak Puas” (10,64%) terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan “**

**Tabel 3.160 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,62%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{95,62\%}{76,61\%}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 95,62% sedangkan target 76,61%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 125%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



**Tabel 3.161 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.

**d) Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah**

Kegiatan pencaangan Penyuluhan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memberikan informasi berkaitan dengan program bantuan hukum gratis.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi terkait bantuan hukum kepada Masyarakat dan dalam rangka penyebarluasan informasi hukum langsung maupun tidak langsung. Target yang ingin dicapai yaitu tersebarluaskannya informasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat. Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersebarluasnya informasi hukum kepada Masyarakat. Adapun penerima manfaat dari pelaksana kegiatan-kegiatan ini antara lain :

- Eksternal, yakni dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan berhadapan dengan hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum;
- Internal, yakni bagi Kantor Wilayah dapat melaksanakan fungsi untuk penyebaran dan diseminasi informasi hukum.

Adapun hasil yang dicapai dalam Penyuluhan Hukum Melalui Dialog Interaktif Bantuan Hukum di Wilayah D.I.





Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah untuk :

1. Memberikan pemahaman tentang Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Memberikan pemahaman tentang Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum secara Gratis melalui OBH yang telah terakreditasi di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta;

Memberikan pemahaman tentang Peran Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta dan para stakeholders dalam program bantuan hukum gratis.

**Tabel 3.162 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

**e) Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:





**Tabel 3.163 Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN**

No	Anggota JDIH
1	Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
5	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
6	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
7	Bagian Hukum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Sleman
9	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Bantul
10	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Kulon Progo
11	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Gunungkidul
12	Bagian Hukum DPRD Kota Yogyakarta




**Tabel 3.164 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dibagi jumlah anggota JDIHN dikali 100%  $\left(\frac{12}{12}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{100}{20}\right) \times 100\% = 500\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebanyak 12 anggota dari total 12 anggota (100%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 20%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 500%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**Tabel 3.165 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	20%	20%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.





## 9. CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN ANGGARAN 2022

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.166 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	143%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	3 Buku	300%

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 3.167 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

### 1) Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

#### a) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Jumlah kajian di Wilayah terdapat 1 (satu) kajian yaitu Implementasi Bantuan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dan jumlah hasil kajian untuk bahan penelitian dan pengembangan





hukum dan ham terdapat 1 (satu) hasil kajian, kajian dan hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan dan sudah disampaikan oleh Balitbang Hukum dan HAM.

**Tabel 3.168 Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dibagi Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100% $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100}{70}\right) \times 100\% = 143\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dari total 1 rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Dengan demikian, realisasi pada indikator tersebut adalah 70%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

**Tabel 3.169 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	70%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.



**b) Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah**

Kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM dengan judul Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi adalah cara menyebarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta melalui diskusi daring sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

**Tabel 3.170 Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	3 Buku	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3}{1}\right) \times 100\% = 300\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku. Maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 300%.

**Tabel 3.171 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

NO	SASARAN	2022		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjiP, dan Perjanjian Kinerja.





## B. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.172 Perbandingan realisasi anggaran**

PROGAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>TAHUN 2022</b>			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,295,771,000	22,254,402,683	99,81%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,113,000,000	2,111,772,473	99,94%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,367,171,000	1,366,180,043	99,93%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	229,395,000	229,357,710	99,98%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,794,050,000	1,787,651,083	99,64%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	216,853,000	216,741,033	99,95%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,008,050,000	1,007,861,346	99,98%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,335,009,000	1,334,956,853	100,00%
<b>Tahun 2021</b>			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,780,433,000	22,721,488,588	99,74%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	1,971,497,000	1,971,053,500	99,98%





Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,225,915,000	1,224,990,910	99,92%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	238,395,000	238,395,000	100,00%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,701,594,000	2,667,497,200	98,74%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	200,687,000	200,685,947	100,00%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,241,726,000	1,239,365,329	99,81%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	914,225,000	908,517,956	99,92%
<b>Tahun 2020</b>			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	19,565,923,000	18,925,135,962	96,72%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,278,000,000	2,005,863,772	88,05%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	955,915,000	786,414,092	82,27%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	162,400,000	162,400,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	233,395,000	215,037,000	92,13%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,269,421,000	2,229,340,000	98,23%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	58,255,000	56,455,000	96,91%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1,086,416,000	961,754,368	88,53%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,176,785,000	662,005,560	56,26%





### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

#### 1) Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu :

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

*Timeline* pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.





## NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART TAHUN 2022 (PER TANGGAL 2 JANUARI 2023) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.173 Nilai SMART Kantor Wilayah

NO	NAMA SATKER	CAPAIAN NILAI KINERJA					
		Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
KANWIL DIY							
1	DIVISI ADMINISTRASI	99,88	98,96	99,9	100	20	100
2	DIVISI YANKUM - AHU	91,87	99,94	99,13	100	8,86	72,15
3	DIVISI PAS	99,99	99,98	99,93	100	20	100
4	DIVISI IMIGRASI	67,5	100	99,98	61,19	-1,84	45,39
5	DIVISI YANKUM - KI	99,95	99,93	99,77	100	20	100
6	DIVISI YANKUM - PP	100	100	100	100	20	100
7	DIVISI YANKUM - HAM	85,71	99,98	100	100	0,02	50,04
8	DIVISI YANKUM - BPHN	94,83	99,64	73,83	100	19,48	98,69
9	DIVISI YANKUM - BALITBANG	85,73	99,95	99,99	100	0,05	50,13
LAPAS							
1	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	90,66	99,16	95,84	100	8,11	70,28
2	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	99,73	98	99,59	100	20	100





3	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	70,34	98,03	95,22	100	-20	0
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	86,23	99,02	99,56	100	0,98	52,45
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	88,6	98,05	99,41	100	4,47	61,18
6	LPKA KELAS IIA YOGYAKARTA	99,28	96,89	97,68	100	20	100
<b>RUTAN</b>							
1	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	99,52	96,35	99,31	100	20	100
2	RUTAN KELAS IIB BANTUL	39,29	96,73	97,37	28,01	-20	0
3	RUTAN KELAS IIB WATES	98,51	97,34	99,59	100	18,39	95,97
<b>RUPBASAN</b>							
1	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	99,63	97,51	99,68	100	19,91	99,77
2	RUPBASAN KELAS II BANTUL	99,41	98,21	99,74	100	19,49	98,72
3	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	99,84	98,58	99,86	100	20	100
4	RUPBASAN KELAS II WATES	97,01	99,54	99,51	100	16	90,01
<b>BAPAS</b>							
1	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	99,69	97,44	99,64	100	20	100
2	BAPAS KELAS II WONOSARI	99,64	97,72	99,24	100	20	100
<b>IMIGRASI</b>							
1	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	91,17	93,69	98,48	100	8,9	72,24





## 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data Kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian *Output*, bobot 25%.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap





perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).



Pengukuran IKPA dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Revisi DIPA

Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap) dengan target 1x per triwulan. Revisi DIPA memiliki bobot 10%.

#### 2. Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan.





Perhitungan Deviasi s.d. bulan Desember tahun berjalan. Halaman III DIPA memiliki bobot 10%.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data. Pengelolaan UP memiliki bobot 10%.

4. Data Kontrak

Dihitung berdasarkan rasio data kontrak (diatas Rp 200 Juta) yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN. Data Kontrak memiliki bobot 10%.

5. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas kontrak diatas Rp 200 Juta yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10%.

6. Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA efektif (dikurangi blokir). Target penyerapan anggaran KL untuk Triwulan III adalah Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, dan Belanja Modal 70%. K/L dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan diberikan nilai maksimal. Penyerapan Anggaran memiliki bobot 20%.

7. Dispensasi Penyampaian SPM

Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Dispensasi Penyampaian SPM memiliki bobot 5%.

8. Capaian Output

Capaian Output merupakan jumlah output yang terkonfirmasi terhadap jumlah output yang dikelola oleh Satker atau K/L. Capaian Output memiliki bobot 25%.





Capaian nilai IKPA satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah :

**Tabel 3.174 Capaian nilai IKPA**

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	409180	KANWIL (AHU)	Nilai	100	94	100	100	100	0	100	100	99.33
2	409181	KANWIL (SETJEN)	Nilai	100	100	100	100	100	99,99	100	100	100
3	409182	KANWIL (DITJEN PAS)	Nilai	100	90,68	92,26	0	0	84,58	100	100	94.97
4	409183	KANWIL (DITJEN IM)	Nilai	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5	409184	KANWIL (KI)	Nilai	100	91,36	100	100	100	0	100	100	99.04
6	409185	KANWIL (DITJEN PP)	Nilai	100	100	100	0	0	91,45	100	100	98.93
7	409186	KANWIL (DITJEN HAM)	Nilai	100	100	100	0	0	93,32	100	100	99.16
8	409187	KANWIL (BPHN)	Nilai	100	100	100	0	0	96,9	100	100	99.61
9	409188	KANWIL (BALITBANG HAM)	Nilai	100	100	100	0	0	96,37	100	100	99.55
10	109111	RUTAN BANTUL	Nilai	100	76,12	93,13	91	100	96,1	100	100	94.95
11	653438	RUPBASAN BANTUL	Nilai	100	100	100	0	0	99,97	100	100	100
12	404611	RUTAN WATES	Nilai	100	94,54	100	100	100	99,85	100	100	99.44





13	652433	RUPBASAN WATES	Nilai	100	89,05	79,59	91	100	100	100	100	93.92
14	497727	LAPAS NARKOTIKA	Nilai	100	100	100	100	100	99,93	100	100	99.99
15	407995	KANTOR IMIGRASI	Nilai	100	82,16	94,79	88,57	100	99,78	100	100	96.01
16	652852	LAPAS SLEMAN	Nilai	100	93,44	99,4	100	100	100	100	100	99.22
17	632590	RUPBASAN YOGYAKARTA	Nilai	100	91,89	100	80	100	89,23	100	100	96.11
18	404585	BAPAS YOGYAKARTA	Nilai	100	88,45	100	100	100	99,91	100	100	98.84
19	418340	LPP KELAS IIB YOGYAKARTA	Nilai	100	87,73	100	100	100	100	100	100	98.77
20	404591	LAPAS YOGYAKARTA	Nilai	100	87,23	100	100	100	100	100	100	98.72
21	109636	RUTAN YOGYAKARTA	Nilai	100	83,63	99,91	100	96	99,91	100	100	97.94
22	653133	BAPAS WONOSARI	Nilai	100	100	100	100	100	99,31	100	100	99.93
23	404630	LAPAS WONOSARI	Nilai	100	91,08	98,85	100	100	96,26	100	100	98.5
24	653442	RUPBASAN WONOSARI	Nilai	100	100	100	100	100	98,88	100	100	99.89
25	419140	LPKA YOGYAKARTA	Nilai	100	89,14	100	100	100	99,99	100	100	98.91
<b>JUMLAH</b>				5415,28	2812,55	5912,76	2105,63	2155,6	2575,91	2750	6250	<b>2461,73</b>
<b>NILAI RATA-RATA</b>												<b>98,4692</b>

Data diunduh tanggal 5 Januari 2023 melalui aplikasi [www.spanint.kemenkeu.go.id](http://www.spanint.kemenkeu.go.id)

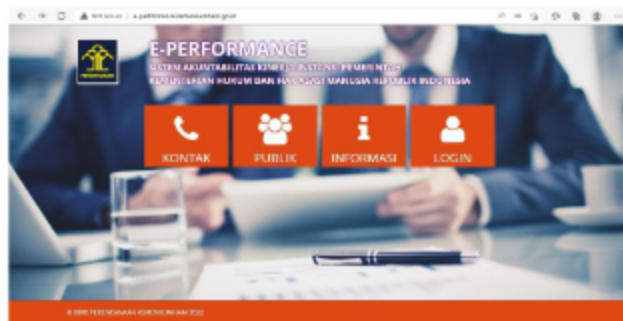




## D. Capaian Kinerja Lainnya

### 1) *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

*E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterarikan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.







## 2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 8 Rencana Strategis dengan 39 Rencana Aksi Target Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Divisi	Sasaran Strategis	Rencana Aksi Target Kinerja
1.	Divisi Administrasi	2	11
2.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	4	14
3.	Divisi Pemasyarakatan	2	11
4.	Divisi Imigrasi	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>39</b>








**Tabel 3.175 Rekapitulasi Nilai Target Kinerja Kantor Wilayah**

DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>	29	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>			100			100			100			100
	30	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah						100						100
	31	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100			100	100	100	100					100
	33	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100	100		100			100			100		100
	34	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid	100	100	100			100			100			100
	35	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100			100			100			100		100
	36	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR!	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	37	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			100			100	100	100	100		100	100
	38	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100		100			100			100			100
	39	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>DIVISI YANKUMHAM</b>	1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	5	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	6	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham						100	100	100	100	100	100	100
	8	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PSK baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
	9	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100	100	100	100		100	100		100	100	100	100
	10	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan <i>IP Clinic</i> atau <i>Mobile IP Clinic</i>		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	11	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	26	70% Desa/Kelurahan sadar hukum		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100
	27	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	28	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	100	100	84	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI PAS	12	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	13	Terseleenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	15	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)												
	16	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	17	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	18	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	19	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6. Kupang, NTT 7. Kota Gorontalo, Gorontalo 8. Kota Palu, Sulteng 9. Ternate, Maluku utara 10. Kota Jayapura, Papua	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan						100	100	100	100	100	100	100
	21	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan	100	100	100	95	95	95	100	100	100	100	100	100
	22	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	100	100	100	95	100	95	100	100	100	100	100	100
	23	Redistribusi pada UPT dengan tingkat <i>overcrowding</i> di atas 300%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>DIVISI IMIGRASI</b>	14	Implementasi <i>Mobile</i> Paspor		100			100			100			100	
	24	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT		100			100			100			100	
	25	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi		100			100			100			100	

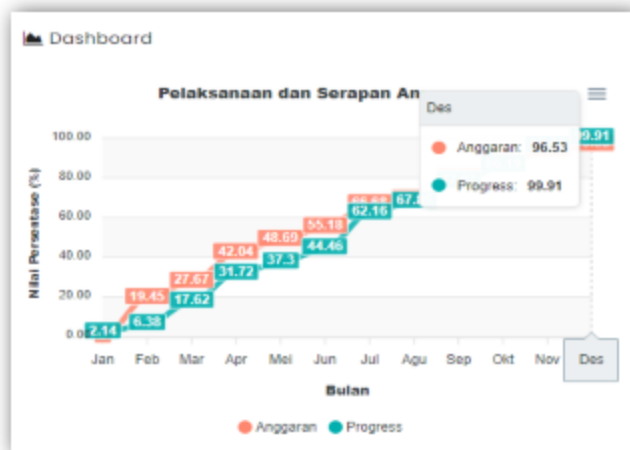




### 3) e-money BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-money.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### REKAPITULASI ENTRY DATA REALISASI E-MONEV BAPPENAS TA 2022 JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA







Tabel 3.176 Realisasi E-Monev Bappenas TA 2022

REALISASI E-MONEV BAPPENAS TA 2022 PER TANGGAL 12/12/2023				
SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	STATUS KEMANFAATAN	PROGRES
JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA	Rp 157.170.973.000	Rp 157.029.519.124	SUDAH	99,91%

#### 4) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah**

**a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari perhitungan SIDBankum dan Omspan;





- Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum dengan rincian 241 (dua ratus empat puluh satu) orang mendapatkan pendampingan pada tahap penyidikan/gugatan dan 194 (seratus Sembilan puluh empat) orang mendapatkan pendampingan pada tahap persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.177 Daftar Nama Bantuan Hukum Litigasi**

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Penyidikan/Gugatan (Orang)	Persidangan (Orang)	Bandung (Orang)	Kasasi (Orang)	Peninjauan Kembali (Orang)
1	YLKBH Handayani	9	22	0	0	0
2	YLBH APIK	11	8	0	0	0
3	LK3 Sekar Melati	9	8	0	0	0
4	YLBH SIKAP	19	11	0	0	0
5	RBH Yayasan AFTA	11	9	0	0	0
6	LBH Al Kautsar	22	14	0	0	0
7	LBH Sembada	11	9	0	0	0
8	YPBH Nyi Ageng Serang	0	14	0	0	0
9	LBH Harapan	11	9	0	0	0
10	LBH Senopati	10	15	0	0	0
11	YLPA D.I Yogyakarta	9	7	0	0	0
12	LKBH FH Universitas Islam Indonesia	9	7	0	0	0





13	LBH Dharma Yudha	9	7	0	0	0
14	PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan	11	8	0	0	0
15	LBH Sekawan	20	3	0	0	0
16	YLBHI LBH Yogyakarta	1	0	0	0	0
17	PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	9	8	0	0	0
18	LBH Tentrem	18	7	0	0	0
19	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	9	8	0	0	0
20	LKBH FH Universitas Janabadra	9	8	0	0	0
21	YPBH Peradi Bantul	12	6	0	0	0
23	PBHI Wilayah Yogyakarta	12	6	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>241</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp.271.170.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.264.811.400 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) atau 97,66% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen) dari perhitungan SIDBankum. Terdapat perbedaan perhitungan serapan anggaran pada Omspan yaitu sebesar Rp.264.836.400 (dua ratus enam puluh empat juta





delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 97,66%(sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen);

- Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.178 Daftar Nama Bantuan Hukum Non Litigasi**

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Negosiasi (Orang)	Mediasi (Orang)	Drafting Dokumen (Orang)	Pendampingan Di Luar Pengadilan (Orang)	Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Penelitian Hukum (Kegiatan)	Investigasi Perkara (Kegiatan)	Konsultasi Hukum (Orang)	Penyuluh Hukum (Kegiatan)
1	YLBH APIK					2				2
2	LK3 Sekar Melati					1				3
3	RBH Yayasan AFTA									6
4	LBH Sembada					2				2
5	YPBH Nyi Ageng Serang					1				2
6	LBH Harapan					2				2
7	LBH Senopati				1	1				5
8	YLPA D.I.Yogyakarta					1				2
9	LBH Dharma Yudha									3
10	LBH Sekawan		1			3				4
11	LBH Tentrem									9
12	YLBH Handayani			3		1				2





13	LBH Al-Kautsar			3		1				2
14	LKBH Fakultas Hukum UII					1	1			1
15	PKBH Fakultas Hukum UAD									3
16	YLBHI LBH Yogyakarta									4
17	PKBH Fakultas Hukum UMY			1		1				2
18	LSBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga					1				2
19	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra									3
20	YPBH Peradi Bantul					1				2
21	PBHI Wilayah Yogyakarta					1				2
22	YLBH SIKAP									
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>			<b>63</b>
<b>PENERIMA BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 93 ORANG PENERIMA</b>						<b>KEGIATAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 100 KEGIATAN</b>				




**Tabel 3.179 Capaian Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi TA 2022**

NO.	NAMA OBH	TAHUN ANGGARAN 2022												
		LITIGASI					NON LITIGASI					TOTAL PAGU AKHIR	TOTAL REALISASI TA 2022	%
		PAGU AWAL	PAGU ADDENDUM I	PAGU ADDENDUM II	TOTAL REALISASI LITIGASI TA 2022	%	PAGU AWAL	PAGU ADDENDUM I	PAGU ADDENDUM II	TOTAL REALISASI NON LITIGASI TA 2022	%			
1	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp63.000.000	Rp63.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp20.940.000	Rp20.670.000	98,71	Rp53.940.000	Rp53.670.000	99,68
2	Lembaga Bantuan Hukum AL KAUTSAR	Rp77.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.300.000	98,35	Rp94.470.000	Rp94.300.000	99,82
3	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp7.654.000	Rp7.654.000	100	Rp49.654.000	Rp49.654.000	100
4	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak D.I.Yogyakarta	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp9.400.000	99,75	Rp52.470.000	Rp51.400.000	97,96
5	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.455.400	99,86	Rp59.470.000	Rp59.455.400	99,98
6	YLBHI LBH YOGYAKARTA	Rp42.000.000	Rp13.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp13.406.000	Rp13.406.000	100	Rp15.406.000	Rp15.406.000	100
7	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp9.580.000	91,5	Rp52.470.000	Rp51.580.000	98,3
8	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp9.400.000	99,75	Rp52.470.000	Rp51.400.000	97,96
9	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LBKH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp10.370.000	Rp10.370.000	100	Rp52.370.000	Rp52.370.000	100





10	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANTUL	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp8.400.000	89,75	Rp52.470.000	Rp51.400.000	97,96
11	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI	Rp77.000.000	Rp84.000.000	Rp84.000.000	Rp84.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.300.000	96,35	Rp94.470.000	Rp94.300.000	99,82
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP	Rp77.000.000	Rp77.000.000	Rp77.000.000	Rp77.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp0	Rp0	0	Rp77.000.000	Rp77.000.000	100
13	PBHI WILAYAH YOGYAKARTA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp8.050.000	86,44	Rp52.470.000	Rp51.050.000	97,29
14	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK YOGYAKARTA	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	100	Rp59.470.000	Rp59.470.000	100
15	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	100	Rp52.470.000	Rp52.470.000	100
16	RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp20.940.000	Rp20.940.000	100	Rp69.940.000	Rp69.940.000	100
17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEKAWAN	Rp42.000.000		Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp20.940.000	Rp20.870.000	99,67	Rp69.940.000	Rp69.870.000	99,9
18	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	100	Rp59.470.000	Rp59.470.000	100
19	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUDHA	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.326.000	96,62	Rp52.470.000	Rp52.326.000	99,73
20	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM NYI AGENG SERANG	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp8.400.000	Rp8.400.000	100	Rp51.400.000	Rp51.400.000	100
21	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp63.000.000	Rp63.000.000	100	Rp10.470.000	Rp20.940.000	Rp31.410.000	Rp31.410.000	100	Rp94.410.000	Rp94.410.000	100
22	Lembaga Bantuan Hukum Harapan	Rp42.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	Rp49.000.000	100	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	Rp10.470.000	100	Rp59.470.000	Rp59.470.000	100
<b>GRANDTOTAL</b>		<b>Rp1.029.000.000</b>	<b>Rp1.014.000.000</b>	<b>Rp1.067.000.000</b>	<b>Rp1.067.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp230.340.000</b>	<b>Rp303.630.000</b>	<b>Rp271.170.000</b>	<b>Rp264.811.400</b>	<b>97,66</b>	<b>Rp1.358.170.000</b>	<b>Rp1.301.811.400</b>	<b>99,53</b>





## BAB IV

# *Penutup*



**Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indikator Kinerja Utama**





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat 22 sasaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program yang terdiri dari :
  - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) Program Administrasi Hukum Umum;
  - 3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
  - 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
  - 5) Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI;
  - 6) Program Pembentukan Hukum;
  - 7) Program Pemajuan HAM;
  - 8) Program Pembinaan Hukum Nasional
  - 9) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.
1. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 54 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang telah ditetapkan tahun 2022.
2. Dari total 54 indikator kinerja, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai, yaitu :
  - 1) Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan, target yang harus dicapai sebesar 80%, namun tidak bisa tercapai dikarenakan tidak terdapat MoU/PKS dan Dipa Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di





wilayah Kanwil kemenkumham D.I. Yogyakarta;

- 2) Indikator Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi. Target yang harus dicapai sebesar 30 orang, namun tidak bisa tercapai dikarenakan tidak terdapat MoU/PKS dan DIPA Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kanwil kemenkumham D.I. Yogyakarta.

Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 54 indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan persentase rata-rata capaian sebesar 204,72%.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2022 untuk 9 DIPA sebesar 99,84%. Sementara itu rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah untuk 9 DIPA dan Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 97,95%. Dari 9 program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian tercapai realisasi keuangan sebesar 100,00%.
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan tercapai realisasi keuangan sebesar 99,98%.
3. Program Administrasi Hukum Umum tercapai realisasi keuangan sebesar 99,94%.
4. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tercapai realisasi keuangan sebesar 99,93%.
5. Program Pembentukan Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 100,00%.
6. Program Pembinaan Hukum Nasional tercapai realisasi keuangan sebesar 99,64%
7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tercapai realisasi keuangan sebesar 99,98%.
8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 99,95%.
9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 99,81%





## B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
  - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.
  - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Adanya koordinasi yang baik antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
  - b. Adanya persamaan persepsi yang sama antara Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum;
  - c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.





6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
- a. Dalam menetapkan target kinerja dan perjanjian kinerja, perlu dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor Imigrasi;
  - b. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu kekonsistenan masing-masing seksi dan sub bagian untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi;
  - c. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal
  - d. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan.
  - e. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
  - f. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong D.I. Yogyakarta menjadi kota yang lebih maju dan bermartabat serta diperhitungkan di jajaran dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.





# Lampiran







**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

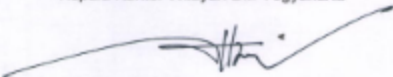
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**  
**DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 % 93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 21,687,394,000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 21,687,394,000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Cahyo Rahadian Muzhar  
NIP. 196909181994031001

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.113.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.113.000.000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal  
 Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Cahyo Rahadian Muzhar  
 NIP. 196909181994031001

Budi Argap Situngkir  
 NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 112.160.782.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 112.160.782.000,-

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332



Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

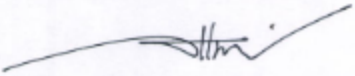
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Pjt. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.J. YOGYAKARTA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks



Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp. 13.590.907.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 13.590.907.000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Pit. Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001



Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu  
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Razilu  
NIP. 196511281991031002

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah  2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	631 Permohonan  1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual  Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah  Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	100 %  2 Lokus  3 Laporan



Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	Rp. 1.367.171.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.367.171.000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Razili  
NIP. 196511281991031002



Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

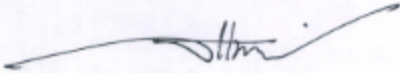
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

H.R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101967031003

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang



Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 290.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 290.000.000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



H.R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Yogyakarta, 3 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.J. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 156.957.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 156.957.000,-
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 2.682.674.000,-</b>
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.682.674.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Pugu Budi Utami

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

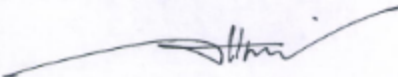
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi  
Manusia

Sri Pugu Budi Utami  
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 260.893.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 260.893.000,-

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Sri Puguh Budi Utami  
NIP. 196207021987032001

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Muallimin Abdi  
NIP. 196211211982031001

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 229,395,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 229,395,000

Yogyakarta, 3 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Mualimin Abdi  
NIP. 196211211982031001



Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211996031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**  
**DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	87,0 92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 % 94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 21,860,741,000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 21,860,741,000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Riktono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar  
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.429.950.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.429.950.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar  
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DI YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

  
Reynhard Silitonga  
NRP. 97090332

**Pihak Pertama,**  
Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta

  
Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**DI YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%



Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 21.388.640.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 83.600.456.000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silunga  
NRP. 07090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Di Yogyakarta

Agung Rektono Selo  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DI YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Imigrasi


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Pjt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana  
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.153.302.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.153.302.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
PIL. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekawahjana  
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu  
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan



No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.140.998.000,-</b>
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.140.998.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razliu  
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang



Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 320,000,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 320,000,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Selo  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa  
Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Muallimin Abdi  
NIP. 19621121 198203 1 001



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 239,895,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 239,895,000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi  
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.J. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhiya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	82% 80% 76,75 (Indeks) 70% 20%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp. 156.957.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 156.957.000,-
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.360.324.000,-</b>
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.360.324.000,-

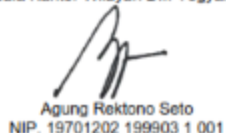
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Wjododo Ekatjahjana  
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan  
NIP. 19840219 198811 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku



Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 261.246.000,-</b>
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 261.246.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
PIL Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan  
NIP. 19840549 198811 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Selo  
NIP. 19701202 199903 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto  
NIP. 19701202 199903 1 001





**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171  
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432  
Website [jogja.kemenkumham.go.id](http://jogja.kemenkumham.go.id)